

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2021



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI ACEH



PROVINSI ACEH KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi BNN RI yang dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh serta Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Pada LKIP BNNP Aceh ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan BNNP Aceh pada tahun 2021.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada tahun 2021, akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja BNNP Aceh di Tahun 2022 nantinya. Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, diharapkan dapat mencapai target kinerja yang lebih terarah, transparan dan akuntabel, serta dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Banda Aceh, Januari 2022

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI ACEH**

Drs. HERU PRANOTO, M.Si



**WAR ON
DRUGS**
BNNP ACEH

IKTHISAR EKSEKUTIF

Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Selanjutnya dalam struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, menetapkan 3 (tiga) satuan kerja sebagai pilar utama dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan.

Dalam rencana strategis BNNP Aceh Tahun 2021 Program P4GN menetapkan sasaran Strategis yaitu : Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi Aceh, dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Penggunaan anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh tahun 2021 dari total pagu sebesar **Rp. 35.614.804.000,-** (*Tiga puluh lima milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus empat ribu rupiah*) terealisasi sebesar **Rp. 34.691.882.938,-** (*Tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) atau sebesar **97,41%** (*Sembilan puluh tujuh koma empat puluh satu persen*) sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp. 922.921.062,-** (*Sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam puluh dua rupiah*) atau sebesar **2,59%** (*Dua koma lima puluh sembilan persen*) dari anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. DASAR HUKUM.....	3
D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN.....	3
E. STRUKTUR ORGANISASI	5
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNNP ACEH	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	10
B. REALISASI ANGGARAN	74
BAB IV PENUTUP	78
KESIMPULAN	78
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

- *Tabel 1 Perjanjian Kinerja BNNP Aceh Tahun Anggaran 2021 (Hal. 8)*
- *Tabel 2 Realisasi dan Capaian Kinerja BNNP Aceh Tahun Anggaran 2021 (Hal. 10)*
- *Tabel 3 Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2021 (Hal. 16)*
- *Tabel 4 Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2021 (Hal. 21)*
- *Tabel 5 Akumulasi anggaran total satker wilayah BNNP Aceh 2021 (Hal. 22)*
- *Tabel 6 Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Seksi Dayamas BNNP Aceh (Hal. 24)*
- *Tabel 7 Akumulasi Hasil Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) di Provinsi Aceh (Hal. 25)*
- *Tabel 8 Akumulasi anggaran total pemberdayaan masyarakat satker wilayah BNNP Aceh 2021 (Hal. 33)*
- *Tabel 9 Akumulasi anggaran total satker wilayah BNNP Aceh 2021 (Hal. 46)*
- *Tabel 10 Laporan LII Dan Pemetaan Jaringan Satkerwil BNNP Aceh 2021 (Hal. 47)*
- *Tabel 11 Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika pada SATKERWIL BNNP Aceh Tahun 2021 (Hal. 54)*
- *Tabel 12 Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya pada Satkerwil BNNP Aceh Tahun 2021 (Hal. 56)*
- *Tabel 13 Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh 2021 (Hal. 67)*
- *Tabel 14 Nilai Kinerja Anggaran Satker BNN Provinsi Aceh tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART KEMENKEU (Hal. 68)*
- *Tabel 15 Rekapitulasi Nilai IKPA Satker BNNP Aceh T.A 2021 (Hal. 72)*
- *Tabel 16 Nilai IKPA Satker BNN Provinsi Aceh tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART KEMENKEU (Hal. 73)*
- *Tabel 17 Akumulasi anggaran total satker wilayah BNNP Aceh 2021 (Hal. 74)*

- *Tabel 18* Akumulasi anggaran satker wilayah BNNP Aceh 2021 Program Dukungan Manajemen Satker Wilayah BNNP Aceh 2021 (Hal. 75)
- *Tabel 19* Akumulasi anggaran satker wilayah BNNP Aceh 2020 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Hal. 76)



DAFTAR GRAFIK

- *Grafik 1* Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2021 (*Hal. 17*)
- *Grafik 2* Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2021 (*Hal. 21*)
- *Grafik 3* Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan Tahun 2017 dan Tahun 2021 (*Hal. 48*)
- *Grafik 4* Perbandingan capaian target jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 (*Hal. 52*)
- *Grafik 5* Perbandingan capaian target jumlah titik lahan tananman ganja dan tanaman terlarang lainnya Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (*Hal. 57*)
- *Grafik 6* capaian target nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (*Hal. 60*)
- *Grafik 7* capaian target nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 (*Hal. 62*)
- *Grafik 8* Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BNN Satkerwil BNNP Aceh Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (*Hal. 65*)
- *Grafik 9* Realisasi Anggaran BNN Satkerwil BNNP Aceh TA. 2021 (*Hal. 75*)
- *Grafik 10* Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Satkerwil BNNP Aceh TA. 2021 (*Hal. 76*)
- *Grafik 11* Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Satkerwil BNNP Aceh TA. 2021 (*Hal. 77*)

DAFTAR LAMPIRAN

- *Lampiran 1* Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
- *Lampiran 2* Sekep Kepala BNNP Aceh tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan LKIP BNNP Aceh Tahun Anggaran 2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat mengkhawatirkan mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di tanah air. Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penguatan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertical sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tata cara penyusunan LKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan terbentuknya satuan kerja vertikal di daerah, diperlukan sistem pengukuran kerja yang seragam, tepat, akurat dan informatif terkait kinerja antara pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota sebagai alat kontrol pengawasan dan pengukuran kinerja.

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Instansi Vertikal, BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tujuan tersebut harus dilaksanakan seimbang dengan satuan-satuan kerja yang ada dalam organisasi Badan Narkotika Nasional dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana

strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sejalan dengan Reorganisasi dan Restrukturisasi di dalam tubuh Badan Narkotika Nasional yang baru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dalam rangka mendukung Visi dan Misi BNN sangat dituntut adanya etos kerja yang tinggi dan profesionalisme. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Target kinerja yang harus dicapai BNNP Aceh tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024 dan Rencana Program Kerja (Renproja) Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indicator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan BNNP Aceh.

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP BNNP Aceh tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan P4GN dalam rangka mencapai visi dan misi BNNP Aceh.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan Program P4GN BNNP Aceh tahun 2021. Tersedianya bahan evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi BNNP Aceh untuk tahun 2022, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

1. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh. Sedangkan Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2014, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan precursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Selain tugas dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b) Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama;
- c) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d) Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f) Pelayanan administrasi.

3. Kewenangan

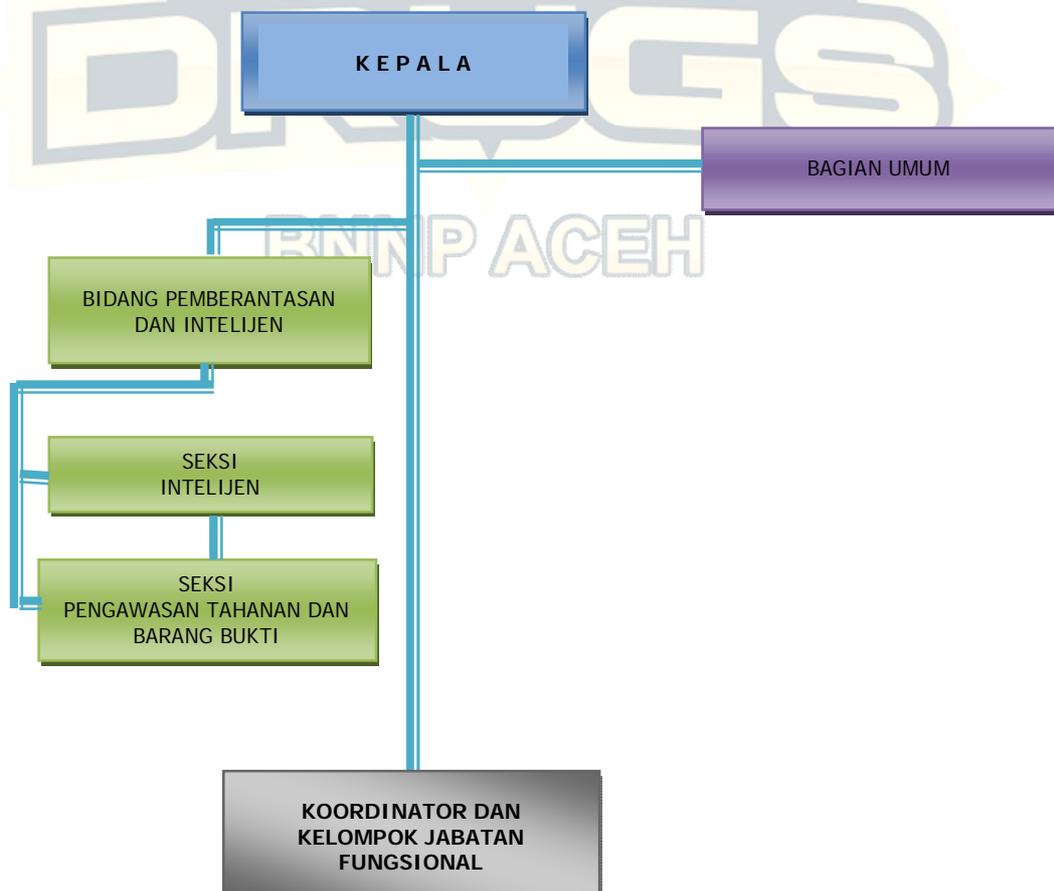
Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a) Kepala;
- b) Bagian Umum;
- c) Bidang Pemberantasan dan Intelijen
- d) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh disusun sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan.
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategi (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja BNN tahun 2021.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/BNN TAHUN 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi Aceh.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNN Provinsi Aceh telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Sumber acuan dalam konteks BNNP Aceh adalah PK (perjanjian Kinerja) yang ditetapkan awal tahun 2021 antara pihak BNN RI dengan BNNP Aceh. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan

suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja BNNP Aceh Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/kota
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	10 kabupaten/kota
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah provinsi	10 kabupaten/kota
4.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada"	8 kawasan
		Nilai keterpulihan kawasan yang diintervensi	2,7
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	53 orang
		Jumlah petugas rehabilitasi tersertifikasi kompetensi teknis	5 orang
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	22 unit
7.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Aceh	3,2
8.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	2 laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah perkara berkas tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas
		Jumlah titik tanaman ganja dan tanaman lainnya yang dimusnahkan	2 titik lahan
10.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100
11.	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-
12.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Aceh	95
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai kinerja anggaran mencapai target	10 BNN Kabupaten/Kota
13.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	94
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	10 BNN Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada awal tahun anggaran 2021, BNNP Aceh sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan BNNP Aceh, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untuk mewujudkan setiap sasaran kegiatan yang diperjanjikan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan 12 (dua belas) sasaran kegiatan dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sembilan belas sasaran kegiatan tersebut, meliputi 10 (sepuluh) sasaran kegiatan bidang operasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum sedangkan 2 sasaran kegiatan lainnya menjadi penyanggah untuk memperkuat/mendukung pencapaian sasaran kepentingan umum.

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja BNNP Aceh Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/ kota	4 Kabupaten/ kota	133%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	10 kabupaten/ kota	8 kabupaten/ kota	80%
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah provinsi	10 kabupaten/ kota	10 kabupaten/ kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada"	8 kawasan	9 kawasan	112%
		Nilai keterpulihan kawasan yang diintervensi	2,7	2,9	107%
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	53 Orang	78 Orang	147,16%
		Jumlah petugas rehabilitasi tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	25 Orang	500%
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	22 Unit	18 Unit	81,81%
7.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Aceh	3,2	3,37	105%
8.	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2 Laporan	4 Laporan	200%
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah perkara berkas tindak perkara narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas Perkara	41 Berkas Perkara	205%
		Jumlah titik tanaman ganja dan tanaman lainnya yang dimusnahkan	2 Titik Lahan	2 Titik Lahan	100%
10.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%

		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100%
11.	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-	-	-
12.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Aceh	95	87,01	91,58%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai kinerja anggaran mencapai target	10 kabupaten/ kota	0 Kabupaten/ Kota	0%
13.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	94	97,46	103,68%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	10 Kabupaten/ kota	8 Kabupaten/ Kota	80%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2021 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Aceh.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Provinsi Aceh Tahun 2021, BNN Provinsi Aceh melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program P4GN di Satker Wilayah Provinsi Aceh, dengan pertimbangan karakteristik yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

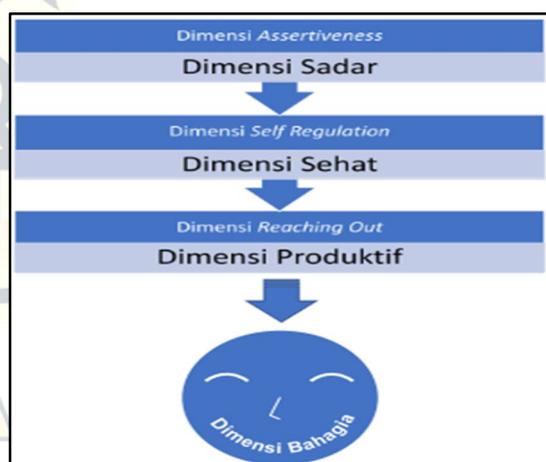
Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNP Aceh tahun 2021 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

• “Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi.

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	133 %

Merujuk kepada Definisi operasional **Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi”** adalah “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika”. Ketahanan diri individu terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkotika dengan menggunakan *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out* sebagai dimensi. Dalam pandangan peneliti, tiga dimensi ini diperlukan

individu untuk bertahan dari dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

Self regulation merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respons perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. **Assertiveness** adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain. **Reaching out** didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) di Provinsi Aceh.

Aspek Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan prioritas nasional di tahun 2021, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Metode Kegiatan

Metode kegiatan dalam bentuk tatap muka (luring), melalui penyampaian materi, dan diisi dengan diskusi, sharing pengalaman, Tanya jawab, praktik, dan presentasi.

b. Media Kegiatan

Media yang digunakan dalam Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja adalah media visual (ilustrasi, potongan gambar, grafik, poster, dll) dan audio visual (video, film, dll) dan media cetak (textual).

c. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan kepada peserta adalah, hand out (materi) kegiatan, bahan tayang, fasilitator yang berpengalaman dibidangnya, konsultasi dengan fasilitator, ruang yang representative guna pelaksanaan tatap muka, konsumsi pada saat tatap muka.

d. Kepesertaan

Peserta dalam kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja beranggotakan 10 (sepuluh) orang,

dimana sepuluh peserta ini adalah peserta yang sama dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

e. Fasilitator

Fasilitator / narasumber yang terlibat dalam pemberian materi Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja berasal dari instansi lain sesuai dengan kompetensi / keahlian yang dimiliki.

f. Moderator.

Diskusi (dialog) dilaksanakan setelah fasilitator selesai melaksanakan presentasi, dan diskusi dipimpin oleh moderator.

g. Pengujian Peserta Kegiatan.

Pada sesi akhir Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja (pertemuan kesepuluh) dilaksanakan pengujian ketahanan diri peserta menggunakan aplikasi Dektari Aja. Pengujian akhir ini terkait dengan hasil pelaksanaan guna memperoleh angka ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna narkoba.

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui :

- a. Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari Aja diakhir pertemuan, dan kompetensi yang diukur ditahun selanjutnya melalui Temu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika.
- b. Tabulasi pengukuran kompetensi akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi dalam salah satu agenda Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) menggunakan aplikasi *Mobile Dektari* terhadap remaja (siswa/ mahasiswa) yang telah dilakukan oleh Penyuluh Narkotika di Wilayah Kerja BNNP dan BNNK Kab/ Kota, maka didapatkan hasil Indeks Dektari untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh diatas, dimana 3 Kabupaten/ Kota yang ditargetkan berkategori tinggi pada tahun 2021, ternyata didapatkan realisasi hasil yang diperoleh berdasarkan hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) menggunakan aplikasi *Mobile Dektari* mencapai 4 Kab/ Kota (133%) yang berkategori tinggi di Provinsi Aceh.

Tabel 3. Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Nilai Dektari	Kategori
1.	BNNP Nanggroe Aceh Darussalam	48,16	Rendah
2.	BNN Kabupaten Aceh Selatan	50,54	Tinggi
3.	BNN Kabupaten Gayo Lues	49,69	Rendah
4.	BNN Kabupaten Pidie Jaya	43,44	Rendah
5.	BNN Kota Sabang	48,45	Rendah
6.	BNN Kota Lhokseumawe	49,06	Tinggi
7.	BNN Kota Langsa	52,15	Tinggi
8.	BNN Kabupaten Bireun	50,13	Rendah
9.	BNN Kabupaten Tamiang	49,40	Rendah
10.	BNN Kabupaten Pidie	48,14	Rendah
11.	BNN Kota Banda Aceh	52,25	Tinggi
Dektari Prov. Nanggroe Aceh Darussalam		49,22	Rendah

Sumber : Deputi Pencegahan BNN RI, 2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Diri Remaja Terhadap Narkoba di Wilayah Provinsi Aceh terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu tinggi dan rendah. Terdapat 4 (empat) BNN Kab/Kota yang berkategori tinggi yaitu BNN Kabupaten Aceh Selatan, BNN Kota Lhokseumawe, BNN Kota Langsa, dan BNN Kota Banda Aceh. Sedangkan 7 BNN Kab/Kota lainnya berkategori rendah termasuk BNNP Aceh. Secara keseluruhan nilai Dektari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk bernilai rendah.

Pencapaian peningkatan dari Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh tidak terlepas dari dukungan Kepala BNNP Aceh didalam memberikan bimbingan dan arahan kepada Program Pencegahan dalam melaksanakan kegiatan Edukasi dan Informasi terhadap ketahanan diri remaja. Peran penyuluh narkoba baik di BNNP Aceh maupun di BNNK Kab/ Kota memiliki peran yang sangat strategis didalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh pada tahun 2021 ini. Pencapaian peningkatan realisasi dari 3 Kab/Kota menjadi 4 Kab/Kota yang memperoleh Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) berkategori tinggi menjadi modal untuk pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh pada pada tahun 2022 mendatang sehingga dapat terealisasi menjadi 5 Kab/ Kota yang memiliki Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) berkategori tinggi.

Bila ditahun 2022 mendatang ditargetkan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh dengan indikator kinerja Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi menjadi 5 Kab/Kota, maka diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya

tenaga Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Aceh maupun di BNNK kab/ Kota dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : dari target yang ditetapkan 3 Kabupaten/Kota untuk Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2021 dapat terealisasi 4 Kabupaten/Kota dengan persentase 133%.



Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan untuk tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena sangat berbeda Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021, jadi tidak bisa dilakukan perbandingan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Keberlangsungan setiap kegiatan pelatihan, terhadap target yang telah ditentukan. Indikator yang menggambarkan efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. **Kriteria Input** berupa Persentase ketersediaan dokumen adalah jumlah dokumen yang harus tersedia dapat dipenuhi dan disediakan seluruhnya sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.
2. **Kriteria Proses**
 - a. Persentase kesesuaian waktu adalah gambaran kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah disusun, dimulai dengan tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Capaian dihitung dari selisih Persentase akumulasi jumlah jam keterlambatan dimulainya kegiatan, dibagi dengan 4 (empat) jam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Persentase kehadiran adalah jumlah peserta yang hadir pada setiap pertemuan dibandingkan jumlah peserta yang terdaftar dalam undangan.

- c. Persentase kesesuaian materi adalah akumulasi ukuran penilaian yang diperoleh isian dari peserta pada form penilaian kegiatan pelatihan.
- d. Jumlah pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan, dihitung dari pertanyaan yang disampaikan baik oleh peserta yang sama maupun dari peserta lainnya.
- e. Persentase dihitung dari pertanyaan yang dapat dijawab dengan tepat oleh fasilitator pada saat kegiatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

3. Kriteria Output

- a. Seluruh form isian wajib diisi dan dihimpun oleh penyelenggara dalam kondisi utuh.
- b. Seluruh siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib mengisi aplikasi Dektari Aja.
- c. Setiap siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib.
- d. Menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada aplikasi Dektari Aja.
- e. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan penilaian pada kategori baik di form kuesioner dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- f. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan dukungan terhadap bentuk kegiatan pelatihan ini dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- g. Laporan kegiatan setiap pertemuan disusun dan tersedia sebagai salah satu media pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Aceh maupun di BNNK kab/ Kota dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Diman selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada didalam gedung/ dikantor, sehingga

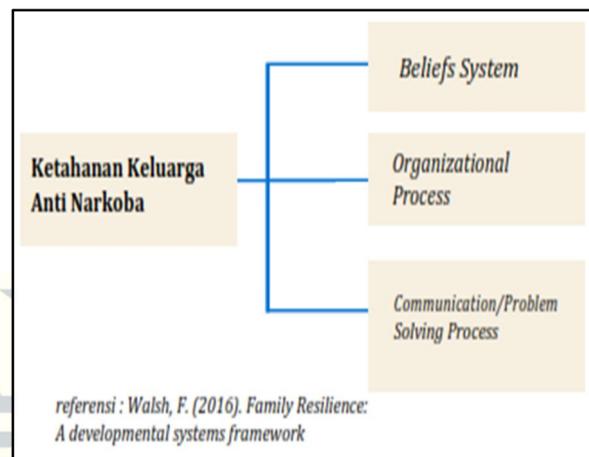
dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh nantinya.

Sasaran Kegiatan 2

• “Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	10 Kab/Kota	8 Kab/Kota	80%

Merujuk kepada Definisi operasional **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi** adalah situasi dimana keluarga yang menghadapi permasalahan mampu mempertahankan fungsi yang sehat meskipun adanya dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pentingnya penguatan ketahanan keluarga juga merupakan salah satu unsur Pembangunan Nasional. Maka diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. BNN akan menjadikan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai Garda Terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Adapun metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yaitu :

a. Metode Pengukuran

Setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi. Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan disetiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kota/Kabupaten yaitu 10 Kota/Kabupaten (Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2021 sesuai dengan pembagian waktu masing-masing wilayah).

b. Pemilihan Keluarga

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara Simple Random Sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

c. Pemilihan responden

Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga, kemudian dilakukan pemilihan sampel dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di Bidang Pencegahan BNN Kota/Kabupaten.

d. Pengisian Kuisisioner

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara* terhadap desa/gampong yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dimana survey ini dilaksanakan oleh Penyuluh Narkoba di Wilayah Kerja BNNP dan BNNK Kab/ Kota, maka didapatkan hasil Indeks Dektara untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh diatas, dimana 10 Kabupaten/Kota yang ditargetkan berkategori tinggi pada tahun 2021, ternyata didapatkan realisasi hasil yang diperoleh berdasarkan hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara* hanya mencapai 8 Kab/ Kota (80%) yang berkategori tinggi di Provinsi Aceh.

Tabel 4. Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Nilai Dektara	Kategori
1.	BNNP Nanggroe Aceh Darussalam	78,482	Tinggi
2.	BNN Kabupaten Aceh Selatan	76,161	Rendah
3.	BNN Kabupaten Gayo Lues	78,125	Tinggi
4.	BNN Kabupaten Pidie Jaya	79,375	Tinggi
5.	BNN Kota Sabang	91,429	Sangat Tinggi
6.	BNN Kota Lhokseumawe	82,321	Tinggi
7.	BNN Kota Langsa	91,429	Sangat Tinggi
8.	BNN Kabupaten Bireun	82,321	Tinggi
9.	BNN Kabupaten Tamiang	75,625	Rendah
10.	BNN Kabupaten Pidie	77,679	Tinggi
11.	BNN Kota Banda Aceh	77,857	Tinggi

Sumber: Deputi Pencegahan BNN RI, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Keluarga Terhadap Narkoba di Wilayah Provinsi Aceh terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, dan rendah. Terdapat 2 (dua) BNN Kota yang berkategori sangat tinggi yaitu BNN Kota Sabang dan BNN Kota Langsa. BNNP Aceh termasuk dalam kategori tinggi bersama dengan 6 BNN Kab/Kota lainnya yaitu BNN Kabupaten Gayo Lues, BNN Kabupaten Pidie Jaya, BNN Kota Lhokseumawe, BNN Kabupaten Bireun, BNN Kabupaten Pidie, dan BNN Kota Banda Aceh.

Diharapkan pada tahun 2022 mendatang ditargetkan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh dengan indikator kinerja Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi menjadi 10 Kab/ Kota (100%), maka diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga fasilitator sebagai Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Aceh maupun di BNNK kab/ Kota melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : dari target yang ditetapkan 10 Kabupaten/Kota untuk Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2021 dapat terealisasi 8 Kabupaten/Kota dengan capaian



persentase 80%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan untuk tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena sangat berbeda Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021, jadi tidak bisa dilakukan perbandingan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Tidak sesuai target Pencapaian peningkatan dari Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh yang hanya dapat mencapai 8 Kab/ Kota (80%) dari 10 Kab/ Kota (100%) yang ditargetkan pada tahun 2021 tidak terlepas dari peran fasilitator sebagai penyuluh narkoba baik di BNNP Aceh maupun di BNNK Kab/ Kota masih belum berperan aktif dalam memberikan fasilitasi dalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh pada tahun 2021 ini.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Aceh maupun di BNNK kab/ Kota dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada di dalam gedung/ di kantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Aceh nantinya

Dalam pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BNNP Aceh tahun 2021 dengan sasaran kinerja dapat dilihat realisasi anggaran dalam pengelolaan kegiatan di BNNP dan BNNK sebagai berikut :

Tabel 5. Akumulasi anggaran total satker wilayah BNNP Aceh 2021

No.	Satker Wilayah BNNP Aceh	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (%)
1.	BNNP Aceh	350.960.000	297.835.000	96,7%	11.270.000	3,3%
2.	BNNK Sabang	217.455.000	216.530.000	99,5%	925.000	0,5%
3.	BNNK Banda Aceh	129.520.000	128.433.000	99,1%	1.087.000	0,9%
4.	BNNK Pidie	224.900.000	195.460.000	86,9%	29.440.000	13,1%
5.	BNNK Pidie Jaya	196.740.000	196.730.000	99,9%	10.000	0,1%
6.	BNNK Bireuen	145.615.000	145.615.000	100%	-	-
7.	BNNK Lhokseumawe	221.548.000	220.417.400	99,5%	1.130.600	0,5%
8.	BNNK Langsa	186.420.000	186.420.000	100%	-	-
9.	BNNK Aceh Tamiang	155.270.000	154.970.000	99,8%	300.000	0,2%
10.	BNNK Gayo Lues	195.550.000	195.550.000	100%	-	-
11.	BNNK Aceh Selatan	125.905.000	124.745.000	99%	1.160.000	1%
Total Rp		2.149.883.000	2.062.705.400	96%	45.322.600	4%

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Seksi Pencegahan BNNP Aceh dengan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dan penyelenggaraan advokasi sejumlah Rp.2.149.883.000 terealisasi sejumlah Rp.2.062.705.400 (96%) dan sisa anggaran Rp.45.322.600 (4%).

Sasaran Kegiatan 3

• "Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN"

Sasaran kegiatan *meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN* terpenuhi sesuai dengan capaian pada indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipatif berkategori "**Mandiri**" di Wilayah Provinsi dengan target pada 10 Kab/Kota. Sesuai dengan yang tercantum pada tabel dibawah ini ;

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	10 Kab/Kota	10	100%

Definisi operasional **Indeks Kemandirian Partisipasi** berkategori “Mandiri” adalah :

1. Adanya *manusia/pelaku/pelaksana* (baik tokoh dan penggiat anti narkoba) di suatu lingkungan masyarakat (menjadi figur dan biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya).
2. Adanya *metode* dalam Pelaksanaan Program P4GN (Kerjasama Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah).
3. Adanya *anggaran yang dialokasikan* untuk mendukung Kegiatan P4GN.
4. Adanya *sarana dan prasarana* yang tidak tersedia yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi maupun sudah tersedia, yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
5. Adanya *sistem, regulasi, aturan yang mengikat* yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Masyarakat. (Baik Perda, Pergub, Surat Edaran)
6. Adanya *kebiasaan hidup sehat dan teratur* yang telah dilaksanakan oleh keluarga di lingkungan tempat tinggal (berolahraga, interaksi aktif antar anggota keluarga, partisipasi masyarakat, adanya sistem keamanan, dan lainnya).

Berdasarkan target capaian nilai mandiri yang ditetapkan Kedeputusan Dayamas Tahun 2021 sebesar 3.15 atau dengan kategori Mandiri. Target capaian tahun 2021 lebih besar bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 3.10. Hal ini menunjukkan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN.

Menunjukkan bahwa realisasi capaian sasaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021 tercapai/ realisasi tercapai 100%. Dimana, 10 Kabupaten Kota mencapai Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori Mandiri sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Seksi Dayamas BNNP Aceh

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
<i>meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN</i>	Indeks kemandirian Partisipatif di Lingkungan Pendidikan	3,15	3,09	98%	MANDIRI
	Indeks kemandirian Partisipatif di Lingkungan Masyarakat	3,15	3,14	98,4%	MANDIRI
	Indeks kemandirian Partisipatif di Lingkungan Pemerintah	3,15	3,22	102,2%	MANDIRI
	Indeks kemandirian Partisipatif di Lingkungan Swasta	3,15	3,18	100,1%	MANDIRI
	TOTAL	3,15	3,16	100%	Mandiri

Sumber: Deputi Dayamas BNN RI

Sedangkan akumulasi secara umum untuk jajaran di BNN Provinsi Aceh di 10 wilayah Kabupaten/Kota juga menunjukkan hasil yang memuaskan dengan kategori Mandiri dan Sangat Mandiri. Dimana capaian secara keseluruhan melebihi dari target nasional yakni 3.15. Dimana, BNNK Banda Aceh mencapai nilai IKP 3,49; BNNK Sabang dengan nilai IKP 3,27; BNNK Pidie dengan nilai IKP 3,27; BNNK Pidie Jaya dengan nilai IKP 3,53; BNNK Bireuen dengan Nilai IKP 3,53; BNNK Lhokseumawe dengan nilai IKP 3,42; BNNK Langsa dengan nilai 3,28, BNNK Tamiang dengan nilai IKP 3,40; BNNK Aceh Selatan dengan nilai IKP 3,24; BNNK Gayo Lues dengan Nilai IKP 3,42.

Tabel 7 Akumulasi Hasil Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) di Provinsi Aceh

REKAP HASIL INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPATIF DI PROVINSI ACEH								
NO	INSTANSI	LINGKUNGAN KERJA	NILAI IKP	KATAGORI	KRITERIA	Total IKP	KATAGORI	KRITERIA
1	BNNP Aceh	1. Pemerintah	3.28	A	Sangat Mandiri	3.29	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	3.44	A	Sangat Mandiri			
		3. Masyarakat	3.2	B	Mandiri			
		4. Swasta	3.24	B	Mandiri			
2	BNNK Banda Aceh	1. Pemerintah	3.54	A	Sangat Mandiri	3.49	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	3.74	A	Sangat Mandiri			
		3. Masyarakat	3.41	A	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	3.21	B	Mandiri			
3	BNNK Sabang	1. Pemerintah	3.56	A	Sangat Mandiri	3.27	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	3.6	A	Sangat Mandiri			
		3. Masyarakat	3.2	B	Mandiri			
		4. Swasta	2.72	B	Mandiri			
4	BNNK Pidie	1. Pemerintah	3.35	A	Sangat Mandiri	3.27	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	3.34	A	Sangat Mandiri			
		3. Masyarakat	3.36	A	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	2.9	B	Mandiri			
5	BNNK Pidie Jaya	1. Pemerintah	2.76	B	Mandiri	3.53	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	4	A	Sangat Mandiri			
		3. Masyarakat	3.68	A	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	3.68	A	Sangat Mandiri			
6	BNNK Bireuen	1. Pemerintah	3.56	A	Sangat Mandiri	3.53	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	3.42	A	Sangat Mandiri			
		3. Masyarakat	3.59	A	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	3.53	A	Sangat Mandiri			
7	BNNK Lhokseumawe	1. Pemerintah	3.6	A	Sangat Mandiri	3.42	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	2.72	B	Mandiri			
		3. Masyarakat	3.72	A	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	3.64	B	Mandiri			

8	BNNK Langsa	1. Pemerintah	3.37	A	Sangat Mandiri	3.28	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	3.4	A	Sangat Mandiri			
		3. Masyarakat	3.39	A	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	2.96	B	Mandiri			
9	BNNK Aceh Tamiang	1. Pemerintah	3.41	A	Sangat Mandiri	3.4	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	3.11	B	Mandiri			
		3. Masyarakat	3.92	A	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	3.17	B	Mandiri			
10	BNNK Aceh Selatan	1. Pemerintah	3.28	A	Mandiri	3.24	B	Mandiri
		2. Pendidikan	3.34	A	Mandiri			
		3. Masyarakat	3.18	B	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	3.18	B	Sangat Mandiri			
11	BNNK Gayo Lues	1. Pemerintah	3.41	A	Sangat Mandiri	3.42	A	Sangat Mandiri
		2. Pendidikan	3.83	A	Sangat Mandiri			
		3. Masyarakat	3.28	A	Sangat Mandiri			
		4. Swasta	3.18	B	Mandiri			
TOTAL			148.4					
NILAI RATA RATA			3.72		Sangat Mandiri			

Dari gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa dari semua lingkungan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat anti narkoba di wilayah kerja BNN Provinsi Aceh terbukti memenuhi target Mandiri (Skala 3,16), bahkan secara akumulatif sangat Mandiri dengan capaian program 100%.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang diberikan pada tahun 2021 sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori Mandiri di Wilayah Provinsi Aceh dapat terealisasi sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja antara tahun 2021 dan 2020 mengalami perbedaan. Dimana tahun 2020, sasaran indikator kinerja kegiatan adalah jumlah instansi/lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba dengan target 74 lembaga. Realisasi Seksi Pemberdayaan masyarakat BNNP Aceh pada tahun 2020 sebesar 100%.

Sedangkan tahun 2021, target dan realisasi yang ditetapkan Kedeputusan Dayamas berubah dari instansi menjadi kawasan sebanyak 10 Kabupaten/Kota yang berkategori Mandiri dalam penanganan P4GN. Perbedaan capaian target ini mengingat adanya perbedaan program dan target nasional yakni Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan). Dimana aspek yang menjadi penilaian adalah wilayah bukan hanya kelembagaan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

A. Faktor Keberhasilan

1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran lingkungan terhadap kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan melalui sosialisasi baik tatap muka dan media cetak.
2. Meningkatnya permintaan kegiatan deteksi narkoba yang banyak dilakukan baik di lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) yang telah membiayai sendiri/mandiri kegiatan tersebut.
3. Meningkatnya respon Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Hal itu dengan lahirnya Qanun No.8 tahun 2018, dan Surat Edaran Gubernur No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Desa Bersih Narkoba.
4. Meningkatnya peran serta BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba hal ini dibuktikan dengan capaian Inpres yang menduduki peringkat kedua nasional.

B. Faktor Hambatan

Adanya faktor hambatan yang dihasilkan pada capaian program kerja dan anggaran tahun 2021. Kondisi yang terjadi hanya hambatan yang diakibatkan karena kondisi Pandemi sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan berhimpun orang. Namun, dengan penerapan izin, dan prosedur proses yang ketat maka kegiatan dapat berlangsung.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Keterbatasan SDM dalam hal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun

Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

Sasaran Kegiatan 4

• "Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan"

Sasaran kegiatan *meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan* terimplementasikan melalui 2 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada".
2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	8 Kawasan	9 Kawasan	112%

Definisi operasional **kawasan rawan narkoba** adalah wilayah yang diidentifikasi dari masyarakat dengan adanya aktivitas madat narkoba, penjualan, barang bukti, dan kasus kejahatan narkotika yang diungkap oleh penegak hukum. Selain itu, wilayah kawasan rawan narkoba juga menjadi jalur edar dan kejahatan narkotika. Serta kondisi sosial masyarakatnya di suatu kawasan.

Indikator atau ukuran Kawasan Rawan Narkoba di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" ditentukan oleh nilai yang dihasilkan dari 8 faktor Utama dan 5 Faktor Pendukung yaitu:

A. Faktor Utama

1. Adanya Kasus Kejahatan Narkoba
2. Angka Kriminalitas/Kekerasan yang terjadi di masyarakat
3. Adanya Bandar/Pengedar Narkoba
4. Adanya Pengguna Narkoba
5. Adanya Kegiatan Poduksi Narkoba
6. Adanya Barang Bukti Narkoba
7. Adanya Entry Point /Pintu Masuk
8. Adanya Kurir Narkoba

B. Faktor Pendukung

1. Banyak Tempat Hiburan
2. Tempat Kost dan Hunian dengan Privacy Tinggi
3. Tingginya Angka Kemiskinan
4. Ketiadaan Sarana Publik
5. Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat

Sebuah kawasan dinyatakan berubah status atau dinyatakan pulih melalui proses pengukuran dengan menggunakan kuisioner **Indikator Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR)** yang variabel pertanyaannya memuat indikator diatas.

Dimana pelaksanaan, kuisioner dilakukan diawal sebelum **pemberian intervensi** dan **setelah proses kegiatan pembinaan atau intervensi** dilakukan di kawasan rawan tersebut. Dalam mengukur indeks keterpulihan suatu wilayah melalui dua variabel, yaitu: (1) tingkat keterpulihan dan (2) tingkat keberhasilan program. Dengan kedua variabel tersebut kondisi kerawanan Narkoba di suatu wilayah dapat diukur tingkat perubahannya, setelah diintervensi dengan program pemberdayaan alternatif.

Sebuah kawasan dinyatakan berubah statusnya setelah hasil akhir pada kuisioner jika hasil pengukuran menunjukkan adanya perubahan pada 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung. Dimana mekanisme pengumpulan nilai digunakan teknik wawancara dari identifikasi variabel yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kuesioner berstruktur yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan jawaban pilihan dan terbuka (ditulis). Jumlah 20 pertanyaan mewakili setiap indikator pengukuran 13 indikator keterpulihan kawasan dan 7 indikator keberhasilan program.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara terpisah, yaitu: pengumpulan primer (wawancara dengan minimal 5 orang masyarakat yang dibina) dan pengumpulan sekunder (dengan wawancara dan pencatatan sumber data, baik kepolisian dan kantor pemerintah. Setelah dilakukan proses tersebut maka dihasilkan nilai akhir yang akan memuat sesuai dengan kategorinya seperti data dibawah ini.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKK	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang diberikan pada tahun 2021 sebanyak 8 kawasan dengan jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada dapat terealisasi sebanyak 9 kawasan dengan persentase capaian 112%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja antara tahun 2021 dan 2020 sedikit mengalami perbedaan dari narasinya. Dimana tahun 2020, dimana sasaran kegiatan adalah Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah narkoba yang berkelanjutan dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif dengan target 5 kawasan/wilayah dan dapat terealisasi 5 kawasan/wilayah dengan persentase capaian sebesar 100%.

Sedangkan pada tahun 2021, dimana untuk sasaran kegiatan adalah meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja adalah jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bayaha menjadi Waspada dengan target 8 kawasan dan dapat terealisasi 9 kawasan dengan persentase capaian sebesar 112%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Adanya manusia/pelaku/pelaksana di lingkungan masyarakat yang menjadi figur dan mampu menyuarakan serta mengajak untuk berbuat dalam program P4GN di dalam maupun diluar lingkungannya, serta adanya metode atau sinergitas dalam pelaksanaan program P4GN antara BNNP/BNNK satker wilayah provinsi Aceh dengan instansi/lembaga Pemerintah Daerah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target knerja adalah sebagai berikut : Keterbatasan SDM dalam hal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah

sebagai berikut : Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,7	2,9	107%

Definisi operasional **kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”** adalah dengan bergesernya capaian nilai IKKR (Indikator Keterpulihan Kawasan Rawan) melalui pengukuran yang dilakukan setelah pelaksanaan program. Dimana pengukuran dilakukan kepada masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan di Gampong Mon Geudong Kota Lhokseumawe. Kondisi ini berbeda dengan capaian atau target tahun lalu dimana tidak menjadi ukuran nilai IKKR dalam Perjanjian Kinerja BNNP Aceh. Untuk nilai capaian dari target 2.7, BNNP Aceh dan jajaran berhasil mencapai nilai realisasi 2,9. (Daftar tabel dibawah ini)

DATA KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN NARKOTIKA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2021								
NO	NAMA SATKER	NAMA KAWASAN	JENIS PELATIHAN	STATUS KERAWANAN	NILAI IKKR	KATEGORI KETERPULIHAN	NILAI KEWIRAUSAHAAN	KATEGORI
1	BNN PROVINSI ACEH	GAMPONG MON GEUDONG, KEC. BANDA SAKTI, KOTA LHOKEUMAWE	PELATIHAN MEMBUAT TAS TANGAN (TOTHE)	BAHAYA	2,53	SIAGA	2,88	BAIK
2		GAMPONG MEURANDEH ACEH, KEC LANGSA LAMA, KOTA LANGSA	PELATIHAN BUDIDAYA MELON DAN CABE	WASPADA	2,56	SIAGA	2,90	BAIK
3		GAMPONG DAYAH MUJARA GAROT, KEC INDRAJAYA, KAB PIDIE	PELATIHAN MENJAHIT BUSANA	WASPADA	2,54	SIAGA	2,92	BAIK
4	BNNK BIREUEN	GAMPONG COT BADA, KECAMATAN JEUMPA, KAB. BIREUEN	PELATIHAN MEMBUAT SABUN CAIR	WASPADA	3,01	SIAGA	2,50	BAIK
5		GAMPONG DARUL AMAN, KEC. PEUSANGAN, KAB. BIREUEN		WASPADA	2,79	SIAGA	2,62	BAIK
6		GAMPONG BALE MEE, KEC. KUTA BLANG, KAB. BIREUEN		WASPADA	2,87	SIAGA	2,53	BAIK
7	BNNK GAYO LUES	KAMPUNG BADAK KEC DABUNG GELANG KAB GAYO LUES	PELATIHAN PAKAN IKAN	BAHAYA	2,49	SIAGA	3,0	BAIK
8		KAMPUNG SEPANG KEC BLANGKEJEREN	PENGOLAHAN KERIPIK PISANG/UBI	SIAGA	3,78	AMAN	3,5	BAIK
9		KAMPUNG PINING KEC PINING KAB GAYO LUES	PENGOLAHAN KOPI BARISTA	WASPADA	3,11	SIAGA	3,1	BAIK
TOTAL					25,68			
NILAI RATA RATA					2,85			

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang diberikan pada tahun 2021 sebesar 2,7 dengan nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi, dapat terealisasi sebesar 2,9 dengan persentase capaian 107%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tidak dapat dibandingkan, dikarenakan indikator kinerja untuk nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi adalah indikator kinerja yang baru dilaksanakan tahun 2021.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan yang baik dengan target institusi/ lembaga terkait dalam mendukung pelaksanaan program P4GN yang dilakukan oleh Satkerwil BNNP Aceh.
- b. Adanyanya peran dari partisipasi masyarakat dalam ikut bersama-sama mengurangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Aktifnya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba baik di institusi maupun di kelompok masyarakat walaupun dengan keterbatasan SDM dalam hal penyebaran informasi ini.
- d. Dukungan dan Kerjasama dari stakeholder swasta dalam ikut berperan serta dalam pembinaan kawasan rawan di provinsi Aceh.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan SDM dalam hal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia.
- b. belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Advokasi di tingkat pengambilan kebijakan lebih dimaksimalkan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan ketercapaian program P4GN di daerah bisa lebih maksimal dengan berpedoman pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020.
- b. Memperkuat sinergi antar instansi baik dengan instansi pusat, instansi pemerintah daerah, dunia usaha/swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih dipertajam dan mendalam dari sebelumnya.
- c. Lebih aktif dalam mensosialisasikan P4GN sehingga pembangunan berwawasan anti narkoba dapat direalisasikan keseluruh pelosok diwilayah Aceh.

Dalam capaian realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Aceh tahun 2021 mencapai Rp 473.746.715 atau sebesar 92,53% dari total pagu Rp 511.984.000. Dimana capaian tersebut terdiri dari capaian program Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif sebesar Rp 92,55% atau Rp 259.740.000 dari pagu Rp 280.660.000,-. Sedangkan capaian Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat sebesar 92,51% atau 214.006.715 dari pagu Rp 231.324.000.

Sedangkan akumulasi anggaran total Satker Wilayah BNNP Aceh Tahun 2021 mencapai Rp3.105.614.000 dengan realisasi mencapai Rp 3.044.624.566 atau 98,04% dengan sisa anggaran mencapai Rp 60.989.434 juta. Untuk daftar rincian per masing masing satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dari jumlah capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam penyerapan anggaran meski kondisi masih dalam *pandemic covid19*.

Tabel 8 : Akumulasi anggaran total pemberdayaan masyarakat satker wilayah BNNP Aceh 2021

No	Satker Wilayah BNNP Aceh	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran
1	BNNP Aceh	511.984.000	473.746.715	92,53%	38.237.285	7,47
2	BNNK Sabang	209.350.000	207.513.600	99,12%	1.836.400	0,88%
3	BNNK Banda Aceh	230.920.000	230.020.000	99,6%	900.000	0,4%
4	BNNK Pidie	209.270.000	207.790.000	99,29%	1.480.000	0,71%
5	BNNK Pidie Jaya	293.830.000	293.532.000	99,90%	298.000	0,1%
6	BNNK Bireuen	420.900.000	416.590.000	99%	4.310.000	1%
7	BNNK Lhokseumawe	186.365.000	185.172.254	99,36%	1.192.746	0,64%
8	BNNK Langsa	215.213.000	214.433.000	99,46%	780.000	0,44%
9	BNNK Aceh Tamiang	214.560.000	213.090.000	99,31%	1.470.000	0,69%
10	BNNK Gayo Lues	337.835.000	335.050.000	99,18%	2.785.000	0,82%
11	BNNK Aceh Selatan	275.387.000	267.687.000	97,2%	7.700.000	2,8%
Total Rp		3.105.614.000	3.044.624.566	98,04%	60.989.434	1,96%

Sasaran Kegiatan 5

"Meningkatnya kapasitas tenaga teknis Rehabilitasi"

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.
2. Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	53 Orang	78 Orang	147,16%

Definisi operasional **petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih** adalah Masyarakat yang dilatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat yang dilakukan langsung oleh masyarakat untuk masyarakat

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang ditetapkan yaitu 53 orang petugas penyelenggara layanan IBM yang akan di latih dapat terealisasi 78 orang atau dengan capaian 147,16% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Org)
1.	BNNP ACEH	10
2.	BNNK BANDA ACEH	10
3.	BNNK PIDIE	5
4.	BNNK PIDIE JAYA	6
5.	BNNK BIREUEN	5
6.	BNNK LHOKSEUMAWE	8
7.	BNNK LANGSA	5
8.	BNNK ACEH TAMIANG	10
9.	BNNK GAYO LUES	5
10.	BNNK ACEH SELATAN	10
11.	BNNK SABANG	4
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH		78

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Persentase penyerapan pembiayaan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$\Sigma(b/a) \times 100$	$78/53 \times 100 = 147,16 \%$	<p>Σ = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih</p> <p>A = Jumlah target petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih</p> <p>B = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih</p>

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

Jika dibandingkan dengan target dan capaian yang diperoleh pada tahun 2021 ini, maka jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan target sebesar 53 Orang dan capaian yang diperoleh sebesar 78 orang dengan persentase capaian sekitar 147,16% dengan anggaran sebesar Rp 123.630.000 dan capaian anggaran sebesar Rp 111.349.300 (90,07%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 12.280.700. Jumlah yang dicapai pada tahun ini tidak ada pembandingan dengan tahun lalu, hal ini karena program IBM adalah program yang di mulai pada tahun 2021.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kab/Kota di Aceh tentang program intervensi Berbasis Masyarakat.
2. Antusias masyarakat terhadap program yang akan di selenggarakan oleh BNNP dan BNN Kab/Kota Aceh.
3. Adanya keinginan Masyarakat untuk menjadi Agen Pemulihan pada daerahnya sendiri
4. Adanya keterbatasan informasi tentang program IBM dan pandangan masyarakat tentang Rehabilitasi

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba

2. Terbatasnya SDM di klinik pratama di BNNP dan BNN Kab/Kota Provinsi Aceh

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor.
2. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	25 Orang	500%

Definisi operasional **petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis** adalah Petugas rehabilitasi adiksi yang sudah lulus dari uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Jika dibandingkan dengan target dan capaian yang diperoleh pada tahun 2021 ini, maka jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan target sebesar 5 Orang dan capaian yang diperoleh sebesar 8 orang dengan persentase capaian sebesar 160 % dengan anggaran sebesar Rp 53.270.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 46.380.200 dan sisa anggaran sebesar Rp 6.889.800,- sehingga persentase capaian yang di peroleh sebesar 87,06%. Capaian anggaran sebesar Jumlah yang dicapai pada tahun ini tidak ada perbandingan dengan tahun lalu, hal ini karena petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis program yang baru di mulai pada tahun 2021.

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Org)
1.	BNNP ACEH	25
2.	BNNK BANDA ACEH	-
3.	BNNK PIDIE	-
4.	BNNK PIDIE JAYA	-
5.	BNNK BIREUEN	-
6.	BNNK LHOKSEUMAWE	-
7.	BNNK LANGSA	-
8.	BNNK ACEH TAMIANG	-
9.	BNNK GAYO LUES	-
10.	BNNK ACEH SELATAN	-
11.	BNNK SABANG	-
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH		25

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase penyerapan pembiayaan Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	$= \frac{\sum(b)}{a} \times 100$	$= \frac{125.201.000}{181.807.000} \times 100 = 68,86 \%$	Σ = Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis A = Jumlah total anggaran pembiayaanpetugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis B = Jumlah total penyerapan pembiayaan petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Jika dilihat dengan capaian target Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis pada tahun 2021 dari target 5 orang dapat terealisasi 8 orang dengan capaian 160 % maka capaian yang diperoleh melebihi angka target yang telah ditetapkan. Sedangkan anggaran yang disediakan ialah sebesar Rp 53.270.000,- realisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp 46.380.200 dengan capaian sebesar 87,06 %. Angka ini tidak ada pembandingan dengan tahun-tahun yang lalu karena petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis baru dimulai pada tahun ini.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Aceh

2. Adanya keinginan dari petugas rehabilitasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang rehabilitasi dan tersertifikasi sesuai kompetensi yang harus dimiliki.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan komponen masyarakat dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.
2. Meningkatkan kompetensi petugas Rehabilitasi dalam layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan petugas-petugas rehabilitasi yang kompeten dibidangnya dalam penanganan pecandu narkoba
2. Petugas-petugas rehabilitasi mempunyai legalitas dalam menjalankan tugasnya.
3. Meningkatkan pengetahuan SDM dibidang rehabilitasi melalui pelatihan penanganan pasien penyalahgunaan narkoba.

Sasaran Kegiatan 6

- "Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba"

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi
2. Jumlah Unit Penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga	100%

Definisi operasional **lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah :

Definisi operasional lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Lembaga rehabilitasi yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba agar Lembaga rehabilitasi yang menyediakan layanan rehabilitasi yang mampu memenuhi target standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai standar layanan minimal (SPM) bagi klinik yang berada di bawah BNN, BNNP dan BNNK.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Target yang ditetapkan pada tahun ini untuk layanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 3 lembaga, realisasi kinerja yang diperoleh yaitu 3 lembaga rehabilitasi yang terdiri dari 1 klinik BNNP Aceh dan 2 lembaga rehabilitasi yang melakukan PKS dengan BNN yaitu Yayasan GEMA (Generasi Emas) dan Yayasan Surya (Seuramoe Mulya Aceh).

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Lbg)
1.	BNNP ACEH	3
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH		3

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	$= \sum (b / a) \times 100$	$= 3 / 3 \times 100 = 100 \%$	<p>Σ = Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi</p> <p>a = Jumlah total target lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi</p> <p>b = Jumlah total capaian lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi</p>

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada periode tahun ini (2021) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini :

Realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu tiga Lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang terdiri dari 1 Klinik pratama BNN Provinsi Aceh dan 2 lembaga rehabilitasi yang ber-PKS dengan BNN. Capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi dan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun ini tidak ada pembandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena program untuk layanan rehabilitasi standar pelayanan minimal (SPM) merupakan program baru yang dijalankan pada tahun 2021.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi dan dorongan dari berbagai pihak untuk menjadikan klinik pratama BNNP/BNNK dan lembaga rehabilitasi IP dan KM agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
2. Adanya keinginan dari klinik Pratama BNNP, BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM untuk mencapai Standar Layanan Minimal.
3. Menjadikan Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM yang terstandar sehingga kedepannya bisa mencapai Standar Nasional Indonesia.
4. Proses pemenuhan persyaratan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya yang relatif lambat dapat menghambat pemenuhan layanan rehabilitasi berstandar minimal yang ditetapkan.
5. SDM yang harus terpenuhi pada Standar Pelayanan minimal (SPM) harus melalui beberapa proses, sehingga penetapan SPM pada Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi terhambat.
6. Kurangnya dukungan pembiayaan untuk melakukan asistensi ke daerah secara langsung.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan komponen masyarakat dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba

2. Meningkatkan kompetensi petugas Rehabilitasi dalam layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba
3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya layanan yang memadai dalam penanganan pecandu narkoba
2. Melengkapi semua berkas kelengkapan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai agar terpenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan
3. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya adalah izin legalitas baik itu pendirian gedung maupun izin operasional yang terkendala di beberapa klinik pratama BNNK baik habis masa berlaku maupun sedang dalam proses perpanjangan.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	22 Unit	18 Unit	81,81%

Definisi operasional **unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)** adalah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional adalah unit penyelenggara layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk kalangan masyarakat itu sendiri pada wilayah tempat tinggalnya dengan para petugas yang telah terlatih dan berkompeten dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba pada wilayahnya.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut: Target unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional pada tahun 2021 adalah sebanyak 22 unit dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 18 unit IBM dan capaian yang diperoleh sebesar 81,81%.

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Unit)
1.	BNNP ACEH	1
2.	BNNK BANDA ACEH	1
3.	BNNK PIDIE	1
4.	BNNK PIDIE JAYA	2
5.	BNNK BIREUEN	2
6.	BNNK LHOKSEUMAWE	4
7.	BNNK LANGSA	1
8.	BNNK ACEH TAMIANG	1
9.	BNNK GAYO LUES	1
10.	BNNK ACEH SELATAN	3
11.	BNNK SABANG	1
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH		18

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	$= \frac{\sum(b)}{a} \times 100$	$= \frac{18}{22} \times 100$ $= 81,81 \%$	<p>Σ=Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi</p> <p>a=target unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi</p> <p>b=realisasi unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi</p>

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ini tidak ada data pembandingan, ini dikarenakan unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Bebasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Aceh merupakan program barui dan pertama dijalankan pada tahun 2021.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah seperti perangkat kecamatan, puskesmas perangkat desa serta kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
3. Keinginan dan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga rehabilitasi dan perlakuan sosial masyarakat terhadap pecandu narkoba
5. Salah satu kendala yang di hadapi di lapangan adalah adanya beberapa komponen desa yang resisten terhadap program-program rehabilitasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba
2. Terbatasnya SDM pada klinik pratama di BNNP dan BNNK Provinsi Aceh

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga milik Instansi Pemerintah untuk berperan aktif mensosialisasikan tentang layanan rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
2. Tersedianya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang lebih mendukung untuk operasional klinik pratama BNNP dan BNNK Provinsi Aceh dan dilakukan kegiatan pendampingan terhadap klien.

Sasaran Kegiatan 7

- "Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi"

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Aceh

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Aceh	3,2	3,37	105,4%

Definisi operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah :
Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima pada klinik pratama milik BNN Provinsi Aceh dan BNNK/Kab yang ada di wilayah Aceh melalui Survey yang dilakukan oleh petugas layanan pada masing-masing klinik yang di koordinir oleh Dir Rehabilitasi dan Deputi Rehabilitasi BNN RI.

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Indeks)
1.	BNN Provinsi Aceh	3.29
2.	BNN Kota Banda Aceh	3.72
3.	BNN Kabupaten Pidie	3.26
4.	BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.36
5.	BNN Kabupaten Bireuen	3.28
6.	BNN Kabupaten Lhokseumawe	3.2
7.	BNN Kota Langsa	3.8
8.	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.76
9.	BNN Kabupaten Gayo Lues	3.10
10.	BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.15
11.	BNN Kota Sabang	3.2
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH		3.37

Sumber: Hasil Pengukuran yang Dilakukan oleh Tim Survey oleh Dir Rehabilitasi dan Deputi Rehabilitasi BNN RI

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNP dan BNNK Seluruh Aceh	$=\sum(b / a) \times 100$	$=3.37/3.2 \times 100\%$	<p>Σ =Jumlah indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNP dan BNNK Seluruh Aceh</p> <p>a=targetindeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNP dan BNNK Seluruh Aceh</p> <p>b=realisasiindeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNP dan BNNK Seluruh Aceh</p>

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Tidak ada perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dikarenakan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNNP Wilayah Provinsi Aceh baru dilaksanakan pada tahun 2021 ini.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNNP dan BNNK Wilayah Aceh telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Adanya ketersediaan pengguna layanan (masyarakat) untuk mengikuti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut.
3. Kesiapan petugas rehabilitasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan kuisioner pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4. Waktu pengisian kuisioner relatif singkat.
5. Keterbatasan sarana handphone android dari pengguna layanan (masyarakat) menjadi kendala utama.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi petugas layanan (enumerator) dengan tim peneliti dari pusat.
2. Kesulitan komunikasi antara enumerator dengan tim peneliti karena koordinasi dilakukan secara virtual.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Mengikut sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.

Dalam realisasi anggaran, Bidang rehabilitasi BNN Wilayah Provinsi Aceh mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.177.619.000,- di Tahun 2021 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.737.685.654,- (78,81 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp 449.933.346,- (21,19 %).

Tabel 9 : Akumulasi Anggaran Total Bidang Rehab Satker Wilayah BNNP Aceh 2021

No	Satker Wilayah BNNP Aceh	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	% Realiasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa Anggaran
1.	BNNP Aceh	711.981.000	455.112.424	62,52%	266.868.576	37,48%
2.	BNNK Sabang	101.707.000	92.525.630	90,97%	9.181.370	9,03%
3.	BNNK Banda aceh	151.331.000	138.359.800	91,43%	12.971.200	8,57%
4.	BNNK Pidie	192.779.000	109.871.500	56,99%	82.907.500	43,01%
5.	BNNK Pidie Jaya	219.480.000	219.245.000	99,89%	235.000	0,11%
6.	BNNK Bireuen	14.125.000	14.125.000	100,00%	-	0,00%
7.	BNNK Lhokseumawe	134.210.000	131.766.300	98,18%	2.443.700	1,82%
8.	BNNK Langsa	166.463.000	161.628.000	97,10%	4.835.000	2,90%
9.	BNNK Aceh Tamiang	198.248.000	169.180.000	85,34%	29.068.000	14,66%
10.	BNNK Gayo Lues	134.323.000	117.025.000	87,12%	17.298.000	12,88%
11.	BNNK Aceh Selatan	152.972.000	128.847.000	84,23%	24.125.000	15,77%
Total		2.177.619.000	1.737.685.654	78,81%	449.933.346	21,19%

Sasaran Kegiatan 8

- “Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.

Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	2 Laporan	4 Laporan	200%

Definisi operasional dari jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah :

- Jumlah total target jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- Jumlah realisasi dari target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang ditetapkan 2 target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan dapat terealisasi sebanyak 4 target jaringan sehingga persentase realisasi sebesar 200% dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :

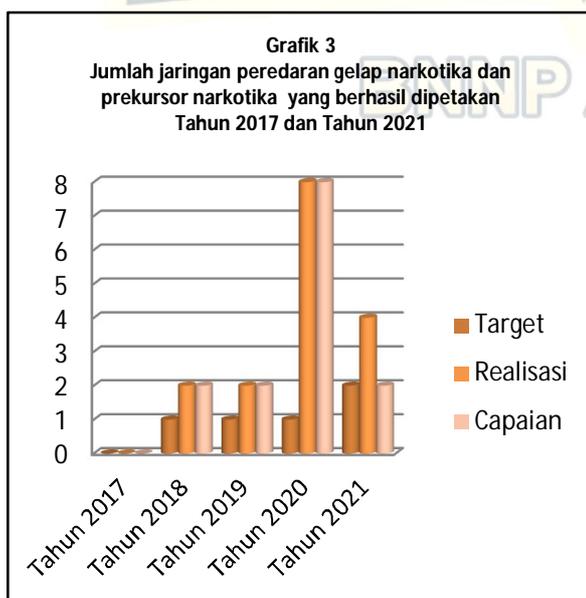
Tabel 10 : Laporan LII Dan Pemetaan Jaringan Satkerwil BNNP Aceh 2021

NO	NOMOR SPRIN	LII	WILAYAH	PEMETAAN		KET
				JARINGAN		
				UTAMA	KECIL	
1.	Sprint/02/II/KA/PB.00/2021/BNNP, 05 Januari s.d. 05 Februari 2021	R/LI/01/1/BNNP, 01 Januari 2021	Aceh Timur	Safrizal Alias Tam bin Usman		
2.	Sprint/10/II/KA/PB.00/2021/BNNP, 05 Februari s.d. 08 Maret 2021	R/LI/08/II/BNNP, 05 Februari 2021	Aceh Timur	Rusli Bin Abu Bakar		
3	sprin/218/VII/ka/pb.02/2021/BNNK-LGS	R/LI-03/VII/ks/pb.02/2021/BNNK-LGS	Langsa Barat			
4	sprin/219/VII/ka/pb.02/2021/BNNK-LGS	R/LI-04/VII/ks/pb.02/2021/BNNK-LGS	Langsa Barat			

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Jaringan)
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	2
2.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	4
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2021		200%

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	$= \frac{\sum(b)}{a} \times 100$	$= \frac{\sum 2}{4} \times 100 = 200\%$	Σ = Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan a = Jumlah total target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan b = Jumlah realisasi dari target jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017), (2018), (2019),(2020) dan periode tahun ini (2021) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini :



Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dengan tahun 2018 tidak dapat dibandingkan karena tahun 2017 tidak ada target pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pada tahun 2018 dari target 1 jaringan dapat terealisasi 2 jaringan dengan capaian sebesar 200% serta pada capaian di tahun 2019 dari target 1 jaringan dapat terealisasi 2 jaringan dengan capaian 200%, ini ada peningkatan dari target yang diberikan. Pada tahun

2020 dari target 1 jaringan dapat terealisasi 8 jaringan dengan capaian 800%, dan pada tahun 2021 dari target 2 jaringan dapat terealisasi 4 jaringan dengan capaian 200%, ada peningkatan dari tahun sebelumnya dan dari target yang diberikan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Mendapat laporan langsung dari informan tentang adanya seseorang yang diketahui sebagai pengguna dan dicurigai sebagai Pengedar Narkotika di Wilayah Provinsi Aceh.
- b. Bahwa dengan adanya keterangan dari pelapor tersebut, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap target operasi.
- c. Dilakukan pembukaan CDR/SMS serta penyadapan terhadap nomor-nomor handphone yang digunakan oleh orang-orang yang berhubungan dengan target.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Pemetaan Jaringan.
- b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peredaran gelap narkotika dan takut memberikan keterangan kepada petugas sehingga petugas masih harus menggunakan bantuan dari informan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Menambah peralatan operasional bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat penindakan.
- b. Mengintensifkan tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil serta dibutuhkannya penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.
- c. Perlunya peningkatan sinergitas antara aparatur pemerintah dalam wilayah kerja Satkerwil BNNP Aceh serta lebih memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat

agar di dapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkoba.

Sasaran Kegiatan 9

• "Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya"

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21.
2. Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan.

Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas	41 Berkas	205 %

Definisi operasional dari jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah :

- a. Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21
- b. Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21

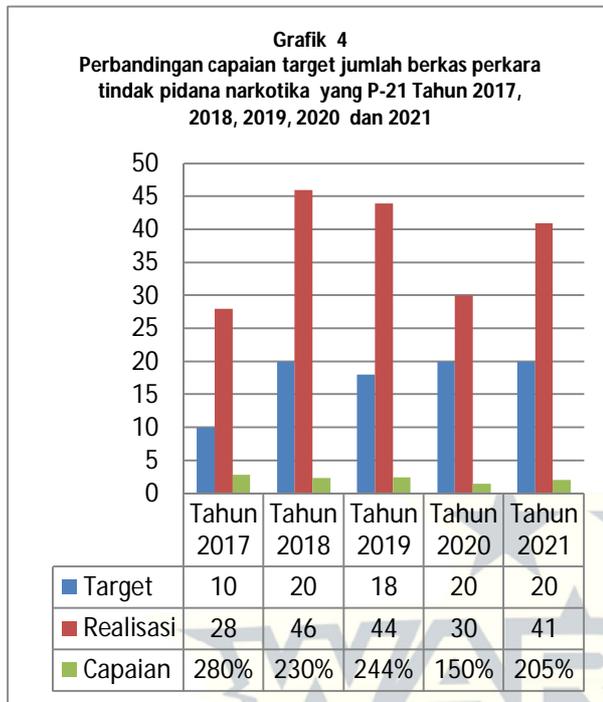
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang ditetapkan di perjanjian kinerja awal tahun 2021 berjumlah 20 berkas perkara, setelah terjadinya refocusing berubah menjadi 17 target berkas perkara P-21. Tindak pidana narkoba yang P-21 dapat terealisasi sebanyak 41 berkas yang sudah P-21 sehingga persentase realisasi sebesar 205% dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	BNNP/BNNK	Capaian
1.	Jumlah berkas penyidikan tindak pidana narkoba	BNNP Aceh	36
		Pidie	1
		Bireuen	3
		Lhokseumawe	1
		Langsa	4
		Aceh Tamiang	10
		Total	57
2.	Jumlah berkas penyidikan tindak pidana narkoba yang belum P-21	BNNP Aceh	10
		Pidie	0
		Bireun	3
		Lhokseumawe	0
		Langsa	0
		Aceh Tamiang	0
		Total	13
3.	Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	BNNP Aceh	26
		Pidie	1
		Biereuen	0
		Lhokseumawe	1
		Langsa	3
		Aceh Tamiang	10
		Total	41
4.	Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21	BNNP Aceh	26
		Pidie	1
		Biereuen	0
		Lhokseumawe	1
		Langsa	3
		Aceh Tamiang	10
		Total	41
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2021		205%	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	$= \frac{b}{a} \times 100$	$= \frac{41}{20} \times 100$ $= 205\%$	Σ = Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 a = Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 b = Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018)

dan tahun (2019) tahun (2020) serta tahun (2021) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.



Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 10 berkas dapat terealisasi 28 berkas dengan capaian sebesar 280%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 20 berkas dapat terealisasi 46 berkas dengan capaian sebesar 230% pada tahun 2019 dari target 18 berkas dapat terealisasi 44 berkas dengan capaian 244%, dan pada 2020 dari target 20 dapat terealisasi 30 berkas dengan capaian 150%, tahun 2021 dari

target 20 dapat terealisasi 41 berkas dengan capaian 205%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya informasi yang valid dan peran serta masyarakat untuk memberi laporan baik secara langsung maupun sms center apabila terdapat peredaran gelap narkoba di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh petugas dilapangan.
- b. Adanya kerjasama Tim dengan Instansi-instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan (Bea Cukai, Polres, BNNP/BNNK dan BNN Pusat), serta dalam proses penyidikan yaitu kejaksaan, pegadaian, dan pengadilan dalam proses pemberkasaan sampai P-21.
- c. Tersedianya SDM penyidik di BNNP/BNNK dalam penyelesaian penyidikan hingga ke tahap P-21.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika.
- b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal dan keterbatasan pusat laboratorium criminal forensic sehingga hasil laboratorium barang bukti narkotika yang dikeluarkan terlalu lama, hal ini dikarenakan banyaknya wilayah kerja yang harus di tangani oleh PUSLABFOR MEDAN.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Menambah peralatan operasional bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.
- b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim dan dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.
- c. Perlunya meningkatkan koordinasi agar tercipta sinergitas antara aparatur pemerintah dalam wilayah kerja Satkerwil BNNP Aceh serta lebih memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat agar di dapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkotika.

Tabel 11 : Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika pada SATKERWIL BNNP Aceh Tahun 2021

NO	BNNP/BNNK	LKN		BERKAS	TERSANGKA		STATUS	BULAN LKN	BULAN P21
1	BNNP ACEH	1	LKN 01	1. Berkas	1	Muhammad Rayfandi	Rehabilitasi	Februari	-
				2. Berkas	1	Imam Akbar Maulana Bin Junaidi			
		2	LKN 02	1. Berkas	1	Safrizal Alias Tam Bin Usman	P21	Maret	Juli
				2. Berkas	1	Zainun Bin Abdul Hamid	P21	Maret	Juli
		3	LKN 03	1. Berkas	1	Muhammad Alias Amad Bin Rasyid	P21	Maret	Juli
				2. Berkas	1	Reza Yusifa Alias Rohid Bin Yusri Usman	P21	Maret	Juli
				3. Berkas	1	Dedi Ihsan Bin Baktiar	P21	Maret	Juli
				4. Berkas	1	Khairi Bin Nurdin	P21	Maret	Juli
		4	LKN 04	1. Berkas	1	Serajuddin Alias Ngoh Din Bin M. Sufi	P21	Maret	Juli
		5	LKN 05	1. Berkas	1	Rusli Bin Abu Bakar	P21	April	Juni
		6	LKN 06	1. Berkas	1	Ferri Iswandi Bin Iskandar	P21	April	Juni
				2. Berkas	1	Junaidi Alias Camat Bin Madsyah	P21	April	Agustus
				3. Berkas	1	Juliadi Saputra Alias Adi Bin Nurdin Saleh	P21	April	Agustus
		7	LKN 07	1. Berkas	1	Ismail Bin Alm. Abdul Majid	P21	April	Agustus
				2. Berkas	1	Muhammad Basri Bin Usman	P21	April	Agustus
				3. Berkas	1	Basyaruddin Bin Idris	P21	April	Agustus
				4. Berkas	1	Wandi Bin Alm. Sofyan	P21	April	Agustus
		8	LKN 08	1. Berkas	1	Ghazi Ahadi Bin M. Hasbi	P21	Mei	Agustus
		9	LKN 09	1. Berkas	1	Akmaluddin Bin Saifuddin	P21	Mei	Juli
				2. Berkas	1	Azhari Alias Ayi Bin Abdullah	P21	Mei	Juli
		10	LKN 10	1. Berkas	1	Rizal Aiyub Bin Muhammad	P21	Mei	Agustus
				2. Berkas	1	Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan	P21	Mei	Agustus
		11	LKN 11	1. Berkas	1	Syamsul Bahri Bin Zainun Yahya	P21	Juni	Juli
		12	LKN 12	1. Berkas	1	Efanda Bin Zulkarnaen	P21	Juni	Oktober
		13	LKN 13	1. Berkas	1	Ilham Maulana Bin Razali	P21	Juni	Oktober
		14	LKN 14	1. Berkas	1	Musliadi Alias Mus Cobra Bin Muhammad Jafar Ali	P21	Juli	Oktober
		15	LKN 15	1. Berkas	1	Yusrizal Bin M. Jamil	P21	Juli	Desember
				2. Berkas	1	Naufal Arrasis Bin Abdurrahman	P21	Juli	Desember
		16	LKN 16	1. Berkas	1	Armia Bin Abdullah	P21	Juli	Dalam Proses
		17	LKN 17	1. Berkas	1	Jainul Arbi Lubis Bin Usman Lubis	P21	Agustus	Dalam Proses
		18	LKN 18	1. Berkas	1	Amriadi Bin Fikri Umar	P21	September	Dalam Proses

				2. Berkas	1	Syukri Bin Ilyas Bransyah	P21	September	Dalam Proses
		19	LKN 19	1. Berkas	1	Eddy Satria Bin Muhammad	P21	September	Dalam Proses
		20	LKN 19	1. Berkas	1	Dian Ferdiansyah Bin Abdullah Hadi	Sidik	September	Dalam Proses
		21	LKN 20	1. Berkas	1	Aiyub Alias Sertoh Bin M. Ali	Sidik	Oktober	Dalam Proses
		22	LKN 22	1. Berkas	1	Andi Saputra Bin Rasyidin	Sidik	Oktober	Dalam Proses
		23	LKN 23	1. Berkas	1	Bahrinuddin Bin Ibrahim	Sidik	November	Dalam Proses
		24	LKN 24	1. Berkas	1	Dedi Saputra Bin Sairin	Sidik	Desember	Dalam Proses
2	BNNK PIDIE	1	LKN 01	1. Berkas	1	Nurdin Bin Rusli Daud	P21	Januari	Februari
				2. Berkas		Adani Bin M. Yusuf	P21		
3	BNNK PIDIE JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BNNK BIREUEN	1	LKN 01	1. Berkas		RASYIDI Bin ABU BAKAR	Sidik	November	Dalam Proses
				2. Berkas		NURHALIMAH Binti IDRIS	Sidik		
				3. Berkas		SAMSUL BAHRI Bin ABDUL HADI	Sidik		
5	BNNK LHOKEUMAWA	1	LKN 01	1. Berkas	1	MAULANA FANSURI Alias SINEK Bin JAMANI	P21	Agustus	September
6	BNNK LANGSA	1	LKN 01	1. Berkas	1	M. Joni AR Bin Abdul Rahman	P21	Maret	April
				2. Berkas	1	Syahril Bin M. Yusuf	P21		
				3. Berkas	1	Agussalem Bin M. Thaleb	P21		
		2	LKN 02	1. Berkas	1	An. Syahrul Ramadhan Bin Alm. Tayib	P21	Maret	
7	BNNK ACEH TAMIANG	1	LKN 01	1. Berkas	1	IRWANSYAH Alias IWAN Bin M DIAH	P21	Januari	Maret
		2	LKN 02	1. Berkas	1	MUHAMMAD ASNAWI Alias AHMAD Alias AWI Bin JURIK	P21	Maret	April
		3	LKN 03	1. Berkas	1	JAILANI Alias JAI Bin MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM	P21	Maret	April
		4	LKN 04	1. Berkas	1	DWI FITRIANI Alias ADES Binti HASBI YAHYA	P21	April	Juni
				2. Berkas	1	RAFLI MUCHAIRIZA Als RAFLI Bin M YUSUF			
		5	LKN 05	1. Berkas	1	ANWAR Als TOCIL Bin RAHMAN USMAN	P21	September	Desember
				2. Berkas	1	JARO RIDO SUBRIMAN Als RIDO Bin AGUSSALIM	P21		
		6	LKN 06	1. Berkas	1	MAHRUF BIN M.SARIF	P21	Oktober	Desember
		7	LKN 07	1. Berkas	1	MUHAMMAD USAYI BANGUN ALS TONGAT BIN M NUR HASIL	P21	Oktober	Desember
		8	LKN 08	1. Berkas	1	AMRI D ALS BINCE BIN JAMERIS DAMANIK	P21	Oktober	Desember
8	BNNK GAYO LUES	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BNNK ACEH SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BNNK SABANG	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BNNK BANDA ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		37	58		58	41		

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	2 Titik Lahan	2 Titik Lahan	100 %

Definisi operasional dari Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya adalah jumlah Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang terealisasi.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah :

1. Jumlah total target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
2. Jumlah realisasi dari target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang ditetapkan 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dapat terealisasi sebanyak 2 lokasi titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya sehingga persentase realisasi sebesar 100% dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :

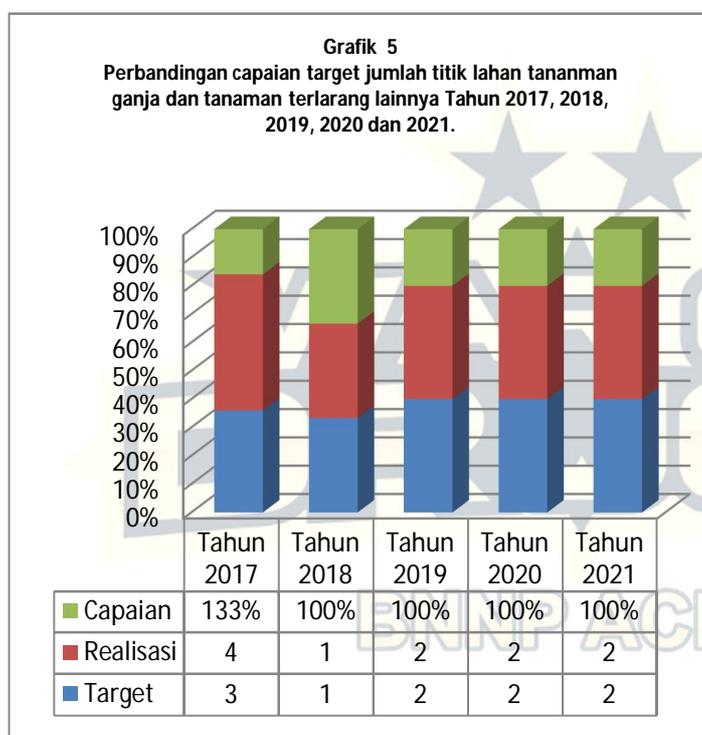
Tabel 12 : Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya pada Satkerwil BNNP Aceh Tahun 2021

No	Target Operasi	Titik lahan tanaman terlarang			Ket
	(Hari/Tanggal)	Daerah	Luas Lahan	Tersangka	
1	17-18 Juli 2021	Pegunungan Aceh Utara Desa Alue Suke, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara	± 2 Hektar	Nihil	
2	19-20 Oktober 2021	Pegunungan kabupaten Aceh Besar, Lamteuba Droo, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar	± 3 Hektar	Nihil	

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Titik Lokasi)
1.	Jumlah total target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	2
2.	Jumlah realisasi dari target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	2
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2021		100%

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	$= \frac{\sum (b / a) \times 100}{100}$	$= \frac{\sum 2 / 2 \times 100}{100} = 100\%$	Σ = Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya a = Jumlah total target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya b = Jumlah realisasi dari target titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017), (2018), (2019), (2020) dan (2021) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.



Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 3 titik lokasi dapat terealisasi 4 titik lokasi dengan capaian sebesar 133%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 1 titik lokasi dapat terealisasi 1 titik lokasi dengan capaian sebesar 100%, tahun 2019 dari target 2 titik lokasi dapat terealisasi 2 titik lokasi dengan capaian sebesar 100%, pada tahun 2020 dari target 2 titik lokasi dapat terealisasi 2 titik lokasi dengan capaian sebesar 100% dan pada tahun 2021 dari target 2 titik lokasi dapat terealisasi 2 titik lokasi dengan capaian sebesar 100%.

capaian sebesar 100% dan pada tahun 2021 dari target 2 titik lokasi dapat terealisasi 2 titik lokasi dengan capaian sebesar 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya informasi yang valid dan peran serta masyarakat untuk memberi laporan baik secara langsung maupun sms center apabila terdapat titik lahan tanaman ganja atau tanaman terlarang di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindak lanjuti oleh petugas dilapangan.

- b. Adanya kerjasama Tim dengan Instansi-instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan sampai penemuan lokasi titik tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan penyelidikan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.
- b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkoba kurang maksimal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat setempat agar dapat memberikan informasi jika ada pihak-pihak yang mendanai kegiatan penanaman lahan ganja.
- b. Menambah peralatan operasional dan alat teknologi bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.
- c. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba dan peningkatan SDM personil Tim.
- d. Dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

Sasaran Kegiatan 10

- "Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba"

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan.
- b. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba.



Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%

Definisi Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah menyelenggarakan pembinaan perawatan dan pemeliharaan fisik maupun administrasi termasuk pembinaan fasilitas keamanan dan ketertiban tahanan.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut yaitu:

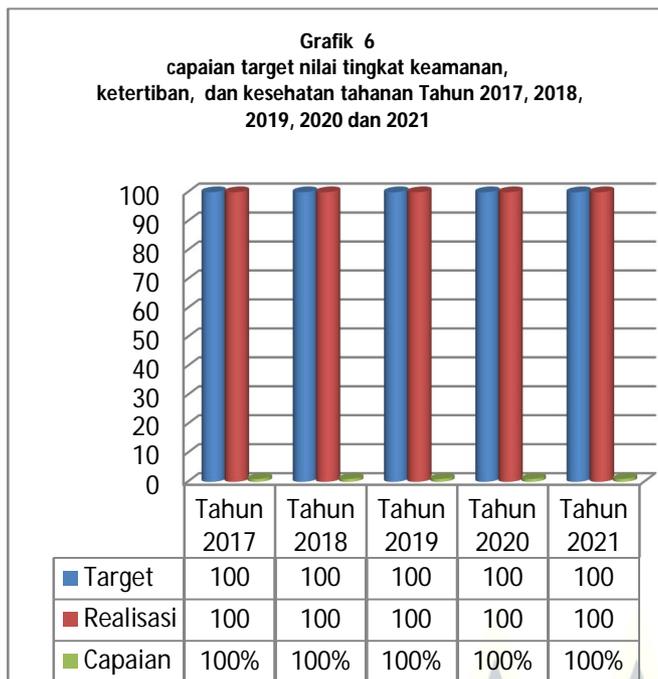
1. Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan
2. Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi 100 atau sebesar 100% dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (bulan)
1.	Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	12
2.	Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	12
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA BNN SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2021		100

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	$= \sum (b / a) \times 100$	$= \sum 12 / 12 \times 100$ $= 100\%$	\sum = Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan a = Jumlah total target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan b = Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017), tahun (2018), tahun (2019), tahun (2020) dan tahun (2021) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.



terrealisasi 100%, ini tidak ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 pada nilai keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terselenggaranya koordinasi, administrasi dan pengendalian yang baik terhadap kegiatan pembinaan serta perawatan tahanan dan pemeliharaan fisik tahanan termasuk pembinaan fasilitas tahanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah

- a. belum tersedianya alat kesehatan yang memadai untuk menunjang perawatan tahanan sehingga harus dilakukan proses rujukan ke instansi kesehatan lainnya.
- b. Belum tersedianya mobil ambulance untuk rujukan ke fasilitas kesehatan lainnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan tahanan.
- b. Diperlukan ruang pemeriksaan kesehatan tahanan yang dekat dengan sel tahanan.
- c. Diperlukan penambahan sel tahanan wanita.
- d. Diperlukan penambahan petugas jaga tahanan (sipir) dan Polwan serta perawat laki-laki.

- e. Diperlukan brankar (tempat tidur dorong) untuk tahanan yang perlu perawatan khusus dalam sel.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana sel tahanan seperti ruangan sel isolasi, kipas angin, sarana pendukung.
- g. Perlu adanya MOU dengan rumah sakit rujukan.
- h. Tersinkronisasinya laporan tahanan masuk dan keluar oleh tim kesehatan Seksi Wastahti

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100	100	100%

Definisi Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba adalah meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut yaitu:

1. Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba
2. Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target yang ditetapkan 100 Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba dapat terealisasi 100 atau sebesar 100% dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :

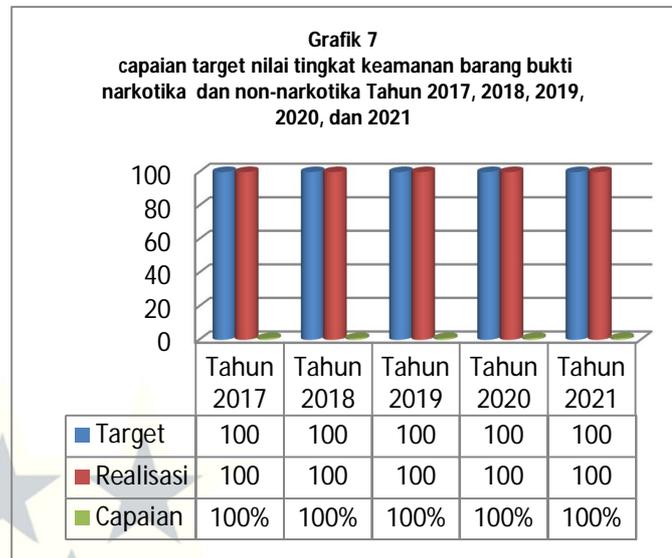
No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (bulan)
1.	Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	12
2.	Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	12
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA BNN SATKERWIL BNNP ACEH TAHUN 2021		100

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	$= \frac{\sum(b)}{a} \times 100$	$= \frac{\sum 12}{12} \times 100$ $= 100\%$	\sum = Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba a = Jumlah total target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba b = Jumlah realisasi dari target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017), periode tahun (2018), tahun (2019), periode (2020) dan periode (2021) dapat terlihat dalam grafik dibawah ini.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian sebesar 100%, capaian pada tahun 2018 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian sebesar 100%, tahun 2019 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian 100%, tahun 2020 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian sebesar 100%, dan pada tahun 2021 dari target 100 dapat terealisasi 100 dengan capaian sebesar 100%, ini tidak ada perubahan dan peningkatan antara tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 pada nilai keamanan,

ketertiban dan kesehatan tahanan.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terlaksana dengan baik seluruh proses baik itu dalam menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya dan Mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku control barang bukti.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemeberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal, sehingga pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tidak terlaksana dengan semestinya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya dan mengontol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti.
- b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba dan peningkatan SDM personil.
- c. Dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

Sasaran Kegiatan ..

- "Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien"

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatannya. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	95	87,01	91,58

Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

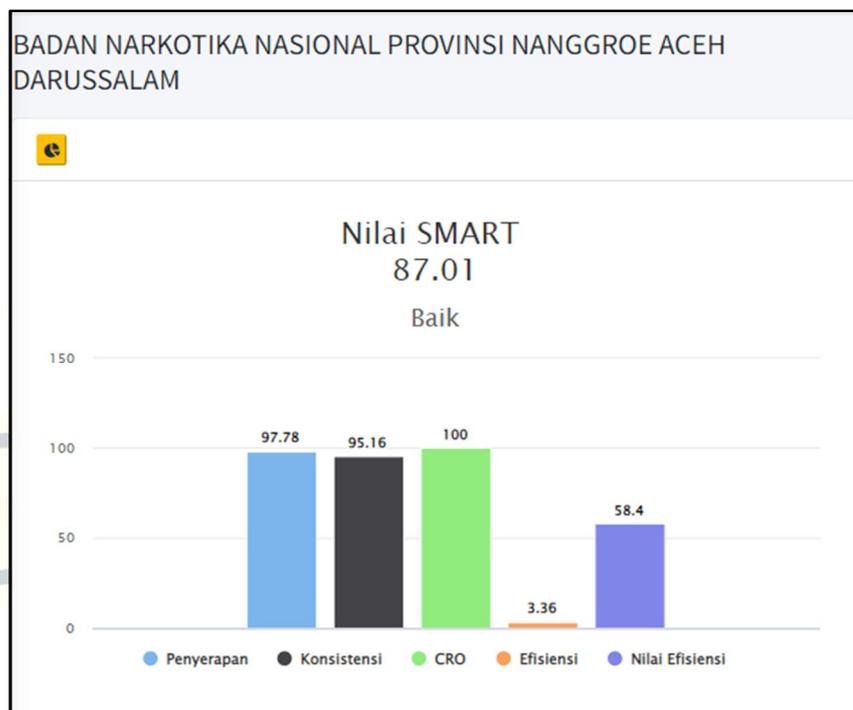
Berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Penyerapan, konsistensi, capaian realisasi output (CRO) dan efisiensi.

Capaian nilai kinerja anggaran BNNP Aceh berdasarkan aplikasi SMART KEMENKEU dengan target capaian 95 terealisasi 87,01 dengan capaian target mencapai 91,58%. Data ini di peroleh dari segmen pengukuran nilai kinerja pada tabel dibawah ini :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Capaian (%)
1.	Penyerapan	97,78
2.	Konsistensi	95,16
3.	Capaian Realisasi Out Put (CRO)	100
4.	Efisiensi	3,36
5.	Nilai Efisiensi	58,4
TOTAL AKUMULATIF NILAI KINERJA ANGGARAN BNN SATKER WILAYAH BNNP ACEH TAHUN 2021		354,7

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	$= \frac{\sum (n2 / n1) \times 100}{100}$	$= \frac{\sum (87,01 / 95) \times 100}{100}$ $= 91,58$	<ul style="list-style-type: none"> - \sum capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian - n1 = Realisasi Anggaran - n2 = Target Nilai Kinerja Anggaran BNN

Gambar Pencapaian Kinerja Anggaran BNNP Aceh pada Aplikasi Sismonev Kemenkue (SMART) Tahun 2021

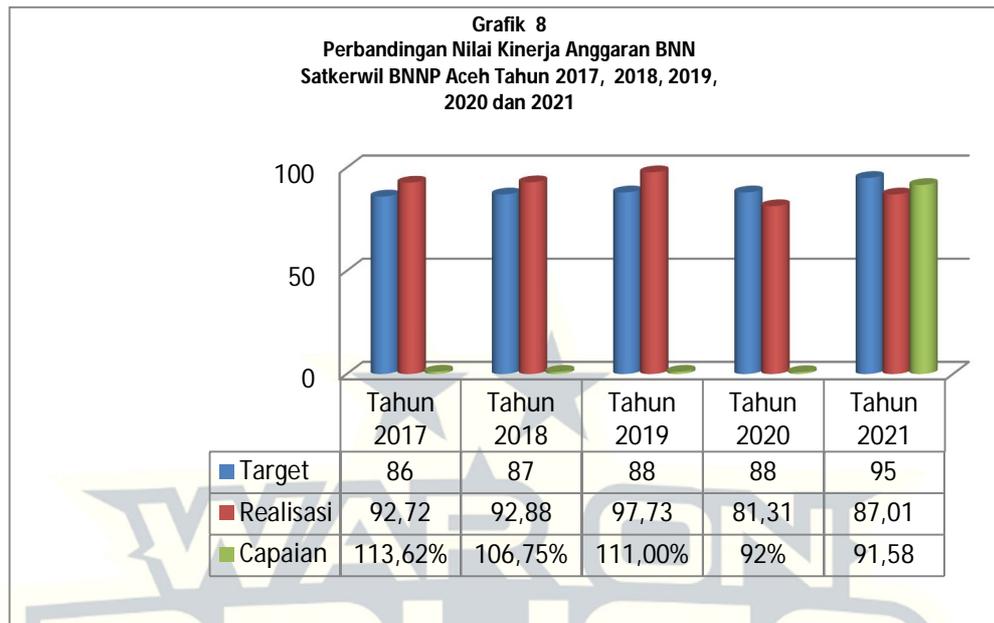


Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja periode sebelumnya tahun (2017) dengan periode tahun (2018) periode tahun (2019), Tahun (2020) dan tahun (2021) .

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dari target 86 dapat terealisasi 92,72 dengan capaian sebesar 113,62%, sedangkan capaian pada tahun 2018 dari target 87 dapat terealisasi 92,88 dengan capaian sebesar 106,75%, tahun 2019 dari target 88 dapat terealisasi 97,73 dengan capaian sebesar 111%, tahun 2020 dari target 88 terealisasi sebesar 83,19 dengan capain sebar 94 % dan untuk tahun 2021 terealisasi

sebesar 87,01 dari target yang ditetapkan yaitu : 95. Artinya nilai Kinerja BNNP Aceh belum memenuhi target.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target 95 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 87,01 atau dengan capaian sebesar 91,58%. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah :



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Aceh sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Aceh.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	10 BNN Kab/Kota	0 BNN Kab/Kota	0

Target yang Nilai Kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 untuk Wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 21. Dari target yang sudah di tetapkan, BNN Kabupaten/Kota belum ada yang memenuhi target, artinya belum terealisasi dengan baik. Data ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 13 : Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh 2021

Realisasi Nilai Kinerja Satker T.A 2021 Wilayah BNNP Aceh				
No	Satker Wilayah BNNP Aceh	Target Nilai Kinerja (%)	Realisasi Nilai Kinerja (%)	Keterangan
1	BNNK BANDA ACEH	90	83,31	Tidak tercapai
2	BNNK SABANG	90	85,03	Tidak tercapai
3	BNNK PIDIE	90	86,03	Tidak tercapai
4	BNNK PIDIE JAYA	88	85,17	Tidak tercapai
5	BNNK BIREUEN	90	86,03	Tidak tercapai
6	BNNK LHOKSEUMAWE	95	86,44	Tidak tercapai
7	BNNK LANGSA	90	87,64	Tidak tercapai
8	BNNK ACEH TAMIANG	95	87,77	Tidak tercapai
9	BNNK GAYO LUES	90	75,95	Tidak tercapai
10	BNNK ACEH SELATAN	90	88,48	Tidak tercapai

Dari data hasil rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh, tidak ada satupun BNN Kab/Kota yang memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021. Hal ini disebabkan karena efisiensi dan nilai efisiensi sangat kecil, akibatnya menyebabkan nilai kinerja anggaran rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 14: Nilai Kinerja Anggaran Satker BNN Provinsi Aceh tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART KEMENKEU

Indikator yang dinilai (%)	Rekap Nilai Kinerja Satker Wilayah BNNP Aceh T.A 2021											Rata-Rata (%)
	BNNP Aceh	BNNK Bireuen	BNNK Lhokseumawe	BNNK Langsa	BNNK Pidie Jaya	BNNK Aceh Selatan	BNNK Gayo Lues	BNNK Sabang	BNNK Pidie	BNNK Aceh Tamiang	BNNK Banda Aceh	
Penyerapan	97,78	98	98,73	96,74	99,9	95,26	95,3	96,73	98	98,09	98,92	97,59
Konsistensi atas RPD	95,16	94,99	96,85	99,6	96,75	99,2	97,38	85,23	94,99	99,31	83,2	94,79
Capaian Output (CRO)	100	100	100	100	100	100	77,43	100	100	100	100	97,95
Efisiensi	3,36	2	2,02	3,26	0,1	4,74	1,4	3,27	2	3,32	1,08	2,41
Nilai Efisiensi	58,4	55,01	55,04	58,15	50,25	61,85	53,49	58,18	55,01	58,31	52,7	56,04
Nilai Kinerja	87,01	86,03	86,44	87,64	85,17	88,48	75,95	85,03	86,03	87,77	83,31	85,35

BNNP ACEH

Sasaran Kegiatan ..

- "Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur"

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	94	97,46	103,68

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sama seperti di tahun sebelumnya Indikator IKPA ini berjumlah 13 indikator dana masing-masing memiliki bobotnya sendiri. Untuk itu pada sosialisasi ini juga dijelaskan terkait beberapa penyesuaian bobot terkait indikator kinerja pada IKPA tahun 2021. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 4 (empat) aspek/sisi pengukuran dan 13 Indikator Kinerja yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran

merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 3 indikator yaitu :

- Revisi DIPA
- Deviasi Halaman III DIPA
- Pagu Minus

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran

merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :

- Data Kontrak
- Pengelolaan UP dan TUP
- LPJ Bendahara
- Dispensasi SPM

3. **Efektivitas pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 4 indikator yaitu :

- a. Penyerapan Anggaran
- b. Penyelesaian Tagihan
- c. Capaian Output
- d. Retur SP2D

4. **Efisiensi pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA, terdiri dari 2 indikator yaitu :

- a. Kesalahan SPM
- b. Perencanaan Kas

Kategori Nilai IKPA :

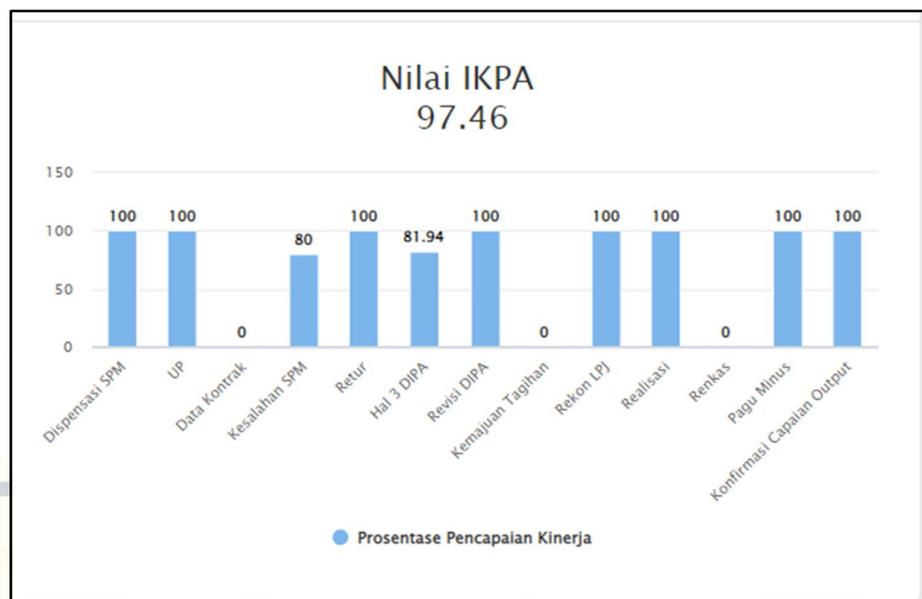
1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89
4. KURANG : nilai IKPA < 70

Nilai IKPA BNNP Aceh Tahun 2021

No	Indikator yang dinilai (%)	Bobot	BNNP Aceh
1	Dispensasi SPM	5	100
2	UP dan TUP	8	100
3	Data Kontrak	15	0
4	Kesalahan SPM	5	80
5	Retur SP2D	5	100
6	Hal 3 DIPA	5	81,94
7	Revisi DIPA	5	100
8	Kemajuan Tagihan	12	0
9	Rekon LPJ	5	100
10	Realisasi	10	100
11	Renkas	5	0
12	Pagu Minus	5	100
13	Konfirmasi Capaian Output	15	100
	Nilai IKPA	100	97,46

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	$= \frac{\sum (n2 / n1) \times 100}{100}$	$= \frac{\sum (97,46 / 94) \times 100}{100}$ = 103,68	<ul style="list-style-type: none"> - \sum capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian - n1 = Realisasi - n2 = Target Nilai IKPA

Adapun grafik Indikator Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat terlihat seperti gambar dibawah, yang mana data diambil dari Aplikasi SMART TA. 2021.



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Aceh tahun 2021 dari target 94 terealisasi sebesar 97,46 atau dengan capaian sebesar 103,68%.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	10 BNN Kab/ Kota	8 BNN Kab/Kota	80 %

Target yang Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 untuk Wilayah Provinsi Aceh sebesar 94 %. Dari target yang sudah di tetapkan, sebanyak 8 (delapan) BNN Kabupaten/Kota sudah mencapai target dan 2 (dua) BNN Kab/Kota belum mencapai target. Data ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 15: Rekapitulasi Nilai IKPA Satker BNNP Aceh T.A 2021

No	Satker Wilayah BNNP Aceh	Target Nilai IKPA (%)	Realisasi Nilai IKPA (%)	Keterangan
1	BNNK BANDA ACEH	94	90,62	Tidak tercapai
2	BNNK SABANG	94	97,31	Tercapai
3	BNNK PIDIE	94	96,15	Tercapai
4	BNNK PIDIE JAYA	94	95,85	Tercapai
5	BNNK BIREUEN	94	89,61	Tidak tercapai
6	BNNK LHOKSEUMAWE	94	98,41	Tercapai
7	BNNK LANGSA	94	97,74	Tercapai
8	BNNK ACEH TAMIANG	94	98,11	Tercapai
9	BNNK GAYO LUES	94	100,00	Tercapai
10	BNNK ACEH SELATAN	94	98,11	Tercapai

Dari data hasil rekapitulasi ada 2 BNN Kab/Kota yang tidak mencapai target yaitu BNN Kabupaten Bireuen dan BNN Kota Banda Aceh. Diharapkan untuk tahun 2022 akan ditingkatkan lagi kinerjanya supaya seluruh BNN Kab/Kota terealisasi dengan baik.

BNNP ACEH

Tabel 16: Nilai IKPA Satker BNN Provinsi Aceh tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART KEMENKEU

Indikator yang dinilai (%)	Rekap Nilai IKPA Satker Wilayah BNNP Aceh T.A 2021											Rata-Rata (%)
	BNNP Aceh	BNNK Bireuen	BNNK Lhokseumawe	BNNK Langsa	BNNK Pidie Jaya	BNNK Aceh Selatan	BNNK Gayo Lues	BNNK Sabang	BNNK Pidie	BNNKAceh Tamiang	BNNK Banda Aceh	
Dispensasi SPM	100	1	100	100	100	100	100	100	100	100	1	82,00
UP dan TUP	100	100	100	100	92	100	0	96	100	100	100	89,82
Data Kontrak	0	0	100	0	0	100	100	100	0	0	0	36,36
Kesalahan SPM	80	80	80	85	80	85	100	90	85	80	80	84,09
Retur SP2D	100	100	100	98,94	100	98,51	100	100	100	100	100	99,77
Hal 3 DIPA	81,94	63,15	0	77,63	79,41	88,17	0	78,64	67,57	0	78,27	55,89
Revisi DIPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
Kemajuan Tagihan	0	0	0	100	0	100	100	100	0	0	0	36,36
Rekon LPJ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
Realisasi	100	100	100	100	97,03	97,49	100	100	92,62	100	100	98,83
Renkas	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	9,09
Pagu Minus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
Konfirmasi Capaian Output	100	100	0	100	100	100	3,09	100	0	15,25	100	65,30
Nilai IKPA	97,46	89,61	98,41	97,74	95,85	98,11	100	98,01	96,15	98,11	90,62	96,37

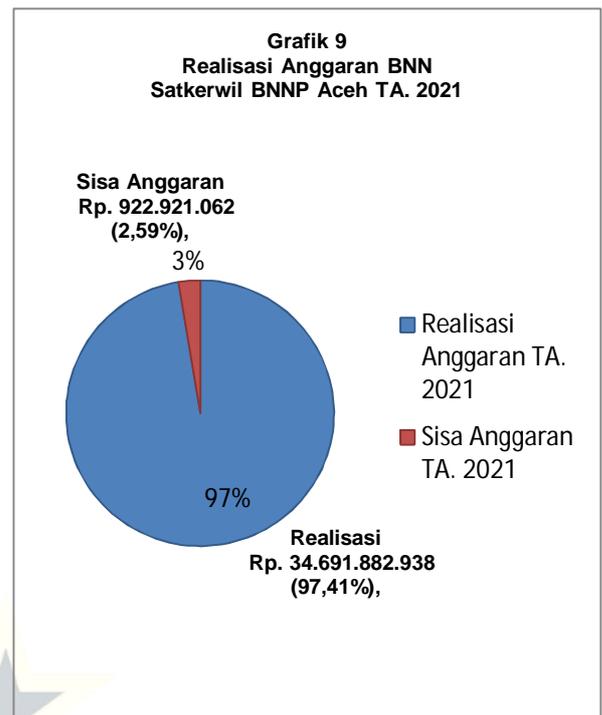
B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021 Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 35.614.804.000,-** (*Tiga puluh lima miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus empat ribu rupiah*). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 (dua) program yaitu : *Program Dukungan Manajemen BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Anggaran ini akumulasi dari seluruh Satker Wilayah BNNP Aceh, dapat di uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 17: Akumulasi anggaran total satker wilayah BNNP Aceh 2021

NO	SATKER WILAYAH BNNP ACEH	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA	% SISA
1	BNNP ACEH	17.066.280.000	16.687.614.441	97,78	378.665.559	2,22
2	BNNK BANDA ACEH	1.468.178.000	1.452.313.906	98,92	15.864.094	1,08
3	BNNK SABANG	1.801.627.000	1.742.709.137	96,73	58.917.863	3,27
4	BNNK PIDIE	1.698.494.000	1.573.087.038	92,62	125.406.962	7,38
5	BNNK PIDIE JAYA	1.985.652.000	1.983.628.190	99,90	2.023.810	0,10
6	BNNK BIREUEN	2.180.004.000	2.136.334.888	98,00	43.669.112	2,00
7	BNNK LHOKEUMAWE	1.909.055.000	1.884.802.093	98,73	24.252.907	1,27
8	BNNK LANGSA	1.969.664.000	1.905.477.998	96,74	64.186.002	3,26
9	BNNK ACEH TAMIANG	1.824.394.000	1.789.629.485	98,09	34.764.515	1,91
10	BNNK GAYO LUES	1.947.638.000	1.856.086.110	95,30	91.551.890	4,70
11	BNNK ACEH SELATAN	1.763.818.000	1.680.199.652	95,26	83.618.348	4,74
	TOTAL	35.614.804.000	34.691.882.938	97,41	922.921.062	2,59

Pada grafik .. menjelaskan, Penggunaan anggaran Satker Wilayah BNNP Aceh tahun 2021 dari total pagu sebesar **Rp. 35.614.804.000,-** (Tiga puluh lima milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus empat ribu rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 34.691.882.938,-** (Tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar **97,41%** (Sembilan puluh tujuh koma empat puluh satu persen) sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp. 922.921.062,-** (Sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam puluh dua rupiah) atau sebesar **2,59%** (dua koma lima puluh sembilan persen) dari anggaran.



1. Program Dukungan Manajemen Satker Wilayah BNNP Aceh, dengan PAGU TA. 2021 Rp. 25.923.950.000,-

Tabel 18 : Akumulasi anggaran satker wilayah BNNP Aceh 2021 Program Dukungan Manajemen Satker Wilayah BNNP Aceh 2021

NO	SATKER WILAYAH BNNP ACEH	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA	% SISA
1	BNNP ACEH	13.926.661.000	13.900.740.977	99,81	25.920.023	0,19
2	BNNK BANDA ACEH	956.407.000	955.501.106	99,91	905.894	0,09
3	BNNK SABANG	1.273.115.000	1.226.839.307	96,37	46.275.693	3,63
4	BNNK PIDIE	1.056.645.000	1.044.715.538	98,87	11.929.462	1,13
5	BNNK PIDIE JAYA	1.206.677.000	1.205.985.190	99,94	691.810	0,06
6	BNNK BIREUEN	1.331.275.000	1.306.079.488	98,11	25.195.512	1,89
7	BNNK LHOKEUMAWE	1.310.880.000	1.291.434.739	98,52	19.445.261	1,48
8	BNNK LANGSA	1.349.668.000	1.294.592.498	95,92	55.075.502	4,08
9	BNNK ACEH TAMIANG	1.127.048.000	1.122.849.540	99,63	4.198.460	0,37
10	BNNK GAYO LUES	1.214.930.000	1.206.876.110	99,34	8.053.890	0,66
11	BNNK ACEH SELATAN	1.170.644.000	1.119.721.652	95,65	50.922.348	4,35
	TOTAL	25.923.950.000	25.675.336.145	99,04	248.613.855	0,96

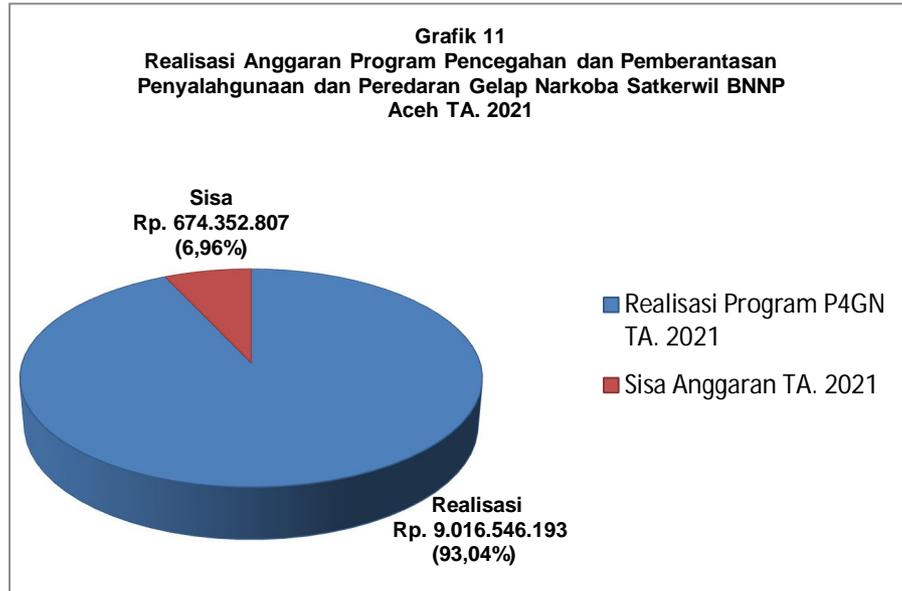
Realisasi untuk program dukungan manajemen Satker Wilayah BNNP Aceh TA. 2021 sebesar Rp.25.675.336.145,- atau sekitar (99,04%). Sisa anggaran dari program ini adalah Rp.248.613.855,- atau sekitar (0,96%). Anggaran untuk program dukungan manajemen Satker Wilayah BNNP Aceh TA. 2021 terserap dengan baik.



2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Satker Wilayah BNNP Aceh dengan PAGU sebesar Rp. 9.690.899.000,-

Tabel 19 : Akumulasi anggaran satker wilayah BNNP Aceh 2021 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

NO	SATKER WILAYAH BNNP ACEH	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA	% SISA
1	BNNP ACEH	3.139.619.000	2.786.873.464	88,76	352.745.536	11,24
2	BNNK BANDA ACEH	511.771.000	496.812.800	97,08	14.958.200	2,92
3	BNNK SABANG	528.512.000	515.869.230	97,61	12.642.770	2,39
4	BNNK PIDIE	641.894.000	528.371.500	82,31	113.522.500	17,69
5	BNNK PIDIE JAYA	778.975.000	777.643.000	99,83	1.332.000	0,17
6	BNNK BIREUEN	848.729.000	830.255.400	97,82	18.473.600	2,18
7	BNNK LHOKEUMAWE	598.175.000	593.367.354	99,20	4.807.646	0,80
8	BNNK LANGSA	619.996.000	610.885.500	98,53	9.110.500	1,47
9	BNNK ACEH TAMIANG	697.346.000	666.779.945	95,62	30.566.055	4,38
10	BNNK GAYO LUES	732.708.000	649.210.000	88,60	83.498.000	11,40
11	BNNK ACEH SELATAN	593.174.000	560.478.000	94,49	32.696.000	5,51
	TOTAL	9.690.899.000	9.016.546.193	93,04	674.352.807	6,96



Pada grafik diatas menjelaskan, Realisasi untuk program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Satker Wilayah BNNP Aceh TA. 2021 sebesar Rp.9.016.546.193,- atau sekitar 93,04%. Sisa anggaran dari program ini adalah Rp.674.352.807,- atau sekitar 6,96%. Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba satker wilayah BNNP Aceh TA. 2021 disebabkan beberapa faktor :

1. Di bagian rehabilitasi khususnya komponen masyarakat tidak dapat dijalankan sama sekali dikarenakan tidak adanya lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memenuhi syarat sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh BNN.
2. Bidang P2M, Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan adanya penghematan dan efisiensi anggaran untuk menunjang kondisi pemulihan pandemi COVID-19.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah dapat merealisasikan berbagai capaian program dan kegiatan melalui implementasi P4GN sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada rencana strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024.

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan LKIP mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Aceh tahun 2021, telah melakukan berbagai upaya dengan optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN. Dukungan moril dan materil dari semua pihak sangat dibutuhkan oleh BNN Provinsi Aceh dalam mewujudkan daerah Provinsi Aceh bebas dari penyalahguna narkoba pada

khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya, sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba tahun 2021 bisa tercapai.

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan pengelolaan pelaksanaan tugas secara administratif dan operasional berdasarkan rencana program dan anggaran yang sudah direncanakan, guna mendapatkan dampak pencapaian kinerja secara jelas, fokus, terukur, dapat dicapai, realistis dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu menjadi tuntutan bagi pencapaian keberhasilan tugas Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh serta Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Pada tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melaksanakan program kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2021 BNNP Aceh mencapai 91,58% sedangkan akuntabilitas kinerja keuangan satker wilayah mencapai 97,41%.

Pengukuran hasil capaian kinerja tersebut menggunakan komponen pengukuran kinerja yang terdiri dari sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan realisasi capaian. Pengukuran kinerja tersebut sangat bermanfaat bagi pengelolaan suatu program dan kegiatan, dan untuk menelusuri kemajuan program kearah pencapaian tujuan, sasaran serta dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekuatan program.

Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja BNNP Aceh pada periode berikutnya.

Banda Aceh, Januari 2022

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI ACEH**

Drs. HERU PRANOTO, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Heru Pranoto, M.Si
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Petrus R. Golose
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional

Dr. Petrus R. Golose

Bogor, 24 Maret 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Provinsi Aceh

Drs. Heru Pranoto, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BNN PROVINSI ACEH**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	10 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	10 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	8 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,7
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	53 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga

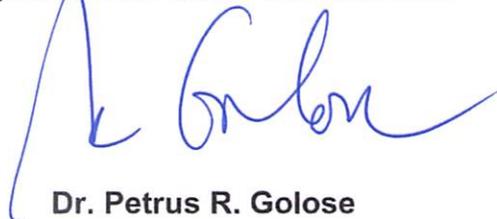
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	22 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Aceh	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2 Laporan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	2 Titik Lahan
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Aceh	95
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	10 BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Aceh	94
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	10 BNN Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp 1.513.625.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp 625.068.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Rp 2.492.284.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Rp 613.330.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp 325.257.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp 1.558.697.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp 57.544.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Rp 100.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika Rp 1.696.354.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp 308.735.000

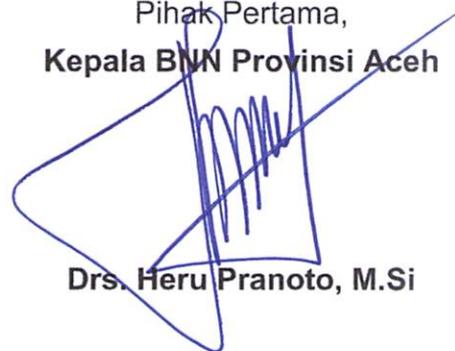
11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp	-
12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	11.397.508.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	190.322.000
14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	330.374.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	12.763.914.000
16. Kegiatan Penyelenggaraan Humas dan Keprotokolan	Rp	206.336.000

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional



Dr. Petrus R. Golose

Bogor, 24 Maret 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Provinsi Aceh



Drs. Heru Pranoto, M.Si



BNNP ACEH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

NOMOR : KEP/ 87 /XII/KA/PR.03.02/2021/BNNP

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK-06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

13. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/120/II/KA/KU/2020/BNN tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-066.01.2.682541/2020 Tanggal 05 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP 2021;
2. Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKIP;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh guna evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
4. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan LKIP kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

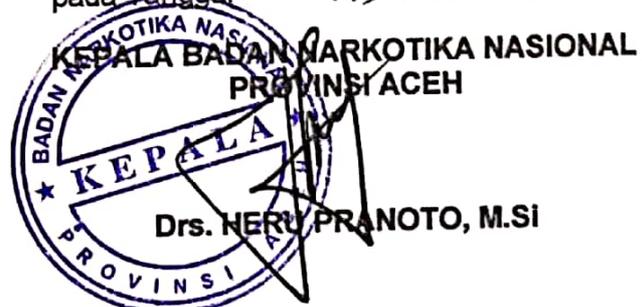
KETIGA : Tim Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KLIP) selesai dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Karo SDM Aparatur dan Organ Settama BNN;
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada Tanggal : 23 November 2021



DAFTAR TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Heru Pranoto, M.Si	Kepala BNNP Aceh	Penanggung Jawab
2.	Werdha Susetyo, SE	Kabag Umum	Ketua
3.	Deni Muntazar, S.TP	Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Perencanaan	Sekretaris
4.	Mirwazi, SH, MH	Plt. Kabid Pemberantasan	Pengarah
5.	Sayuti, M.Kes	Konselor Adiksi Ahli Madya / Koordinator Bidang Rehabilitasi	Pengarah
6.	Dedi Andria, SKM, M.Kes	Penyuluh Narkoba Ahli Muda / Sub Koordinator Pencegahan	Anggota
7.	Supinah, SKM	Analisis Kepegawaian Ahli Muda / Sub Koordinator Administrasi	Anggota
8.	Elhurida, ST	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda / Sub Koordinator Sarpras	Anggota
9.	dr. Deny Fahrian Murfadli	Konselor Adiksi Ahli Muda / Sub Koordinator Rehabilitasi	Anggota
10.	Saiful, S.Pd	Konselor Adiksi Ahli Muda / Sub Koordinator Pasca Rehabilitasi	Anggota
11.	Humbang Ompu Sunggu, SE	Kasi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Anggota
12.	Suharmansyah, S.Sos	Penyuluh Narkoba Ahli Muda / Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada Tanggal : 23 November 2021

